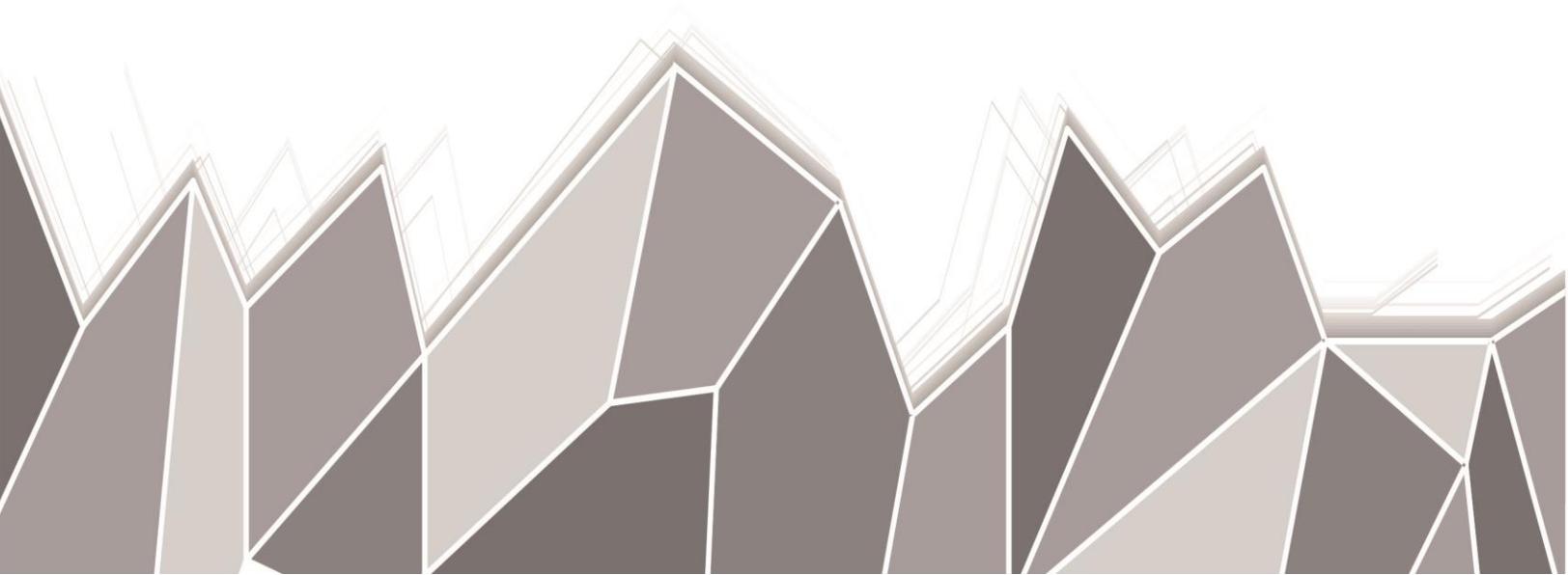
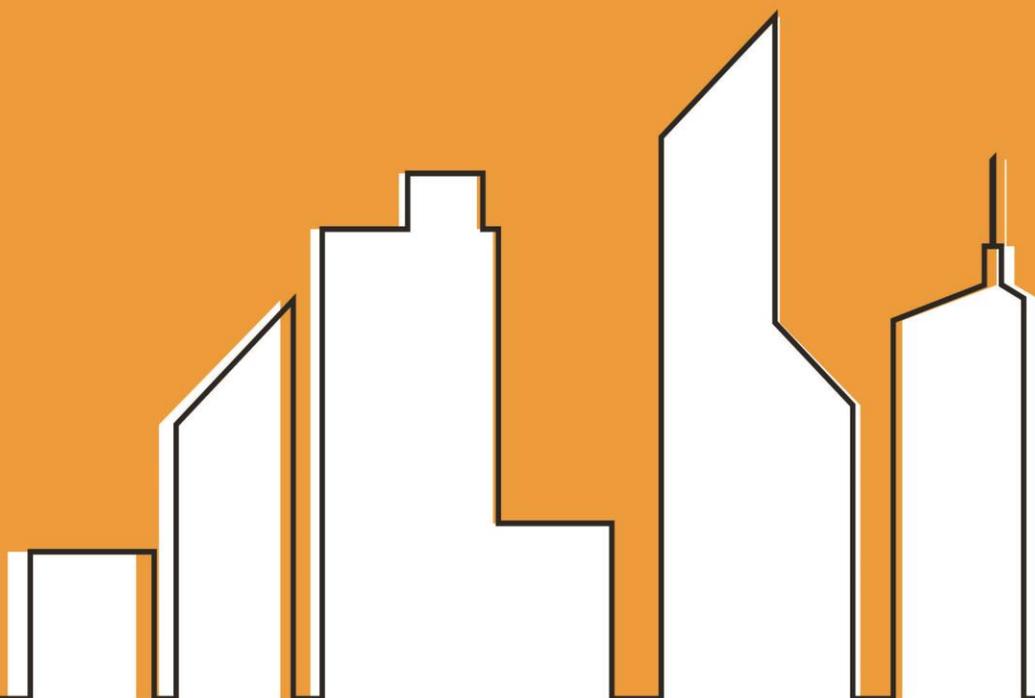


DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR



RENCANA KERJA

20 24





SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

5. Rencana . . .

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
11. Subkegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, dan kaidah pelaksanaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja-PD Tahun 2024;
 - b. penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2024 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2024 meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
 - b. Bab II . . .

- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis pembangunan, dan prioritas pembangunan tahun 2023;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, memuat kebijakan pembangunan kewilayahan dan arahan kepada Kabupaten/Kota;
 - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Uraian dari sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuin ya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 41 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Definisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2024. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing.

Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah berperan dalam menciptakan kestabilan, keamanan dan kebijakan pembangunan Daerah. Kondisi perekonomian dunia yang saat ini sedang melambat pertumbuhannya karena disebabkan pandemi covid-19 menjadi perhatian semua pihak karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat, namun dengan keterlibatan dan komitmen semua pihak masa pandemi tersebut dapat dilalui dengan baik. Fokus utama yang harus dilakukan saat ini adalah tentang kebijakan yang diambil untuk pemulihan ekonomi pasca covid-19 sehingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat dipenuhi.

Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam bagian kelima dari peraturan ini menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi:

- (1) Persiapan penyusunan RKPD,
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD,
- (3) Penyusunan rancangan RKPD,
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
- (5) Perumusan rancangan akhir RKPD dan
- (6) Penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.1.3. Kedudukan RKPD tahun 2024 dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Kedudukan RKPD tahun 2024 merupakan perencanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Mengingat tahun 2019 merupakan periode transisi antara RPJMD tahun 2014-2019 dengan RPJMD tahun 2019-2024. Hal ini konsisten dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, optimalisasi sumberdaya diharapkan dapat mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

1.1.4. Kedudukan RKPD dengan RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Landasan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun RKPD tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841)
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

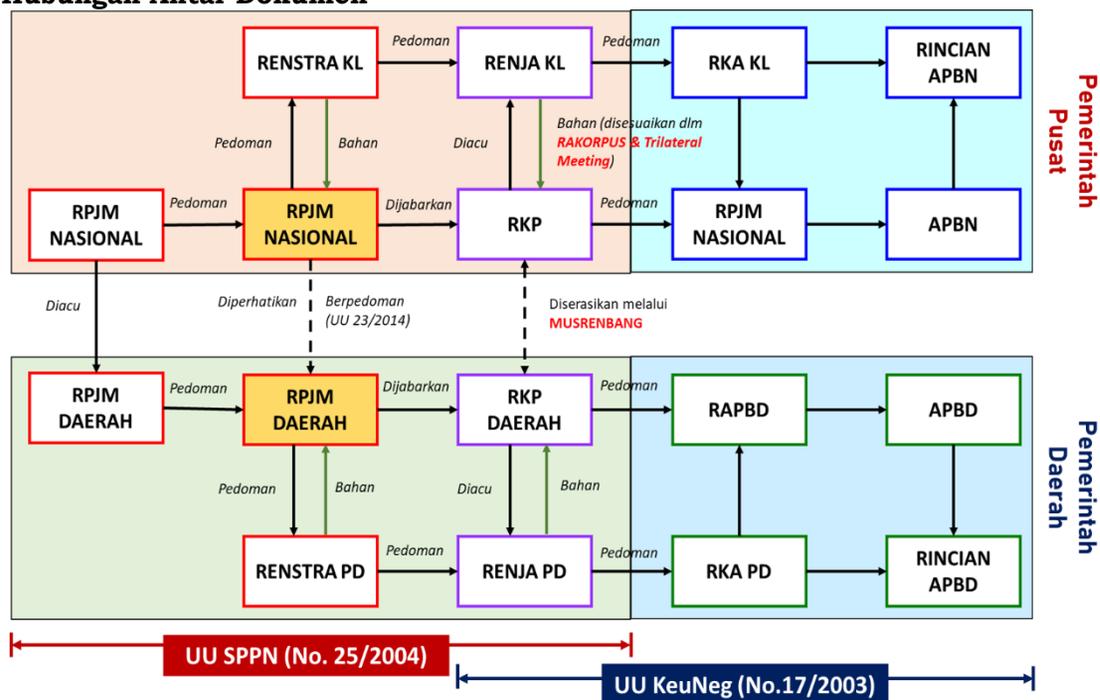
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Posisi dokumen RKP sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKP tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKP. Dalam hubungannya dengan RKP, RKP diselaraskan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional. Dokumen RKP sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) sebelum menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD. RKP Provinsi Jawa Timur terdapat Korelasi

antar dokumen perencanaan Dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat a-spasial sebagaimana tersebut di atas, perlu disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ), serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan berpedoman dengan RPJPD. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJPD dan RPJMD, yang sama-sama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial. Secara Detil keterkaitan RKPD dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut;

Tabel 1.1
Keterkaitan RKPD tahun 2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
	Tema RKPD 2024 <i>Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak.</i>	Arah Kebijakan RPJMD-P tahun 2024 <i>“Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Bersemangat Gotong Royong”</i>
1	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Pada dokumen RPJMD-P target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,65 – 5,67.
2	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai upaya mengukur penurunan kesenjangan, dipergunakan Indeks Theil dan Indeks Gini. Target Indeks Theil tahun 2024 sesuai dengan target RPJMD-P sebesar 0,30161 - 0,2959.• Sedangkan target Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,3670 – 0,3665.
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas SDM, diukur dengan IPM, dimana target IPM dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,85 – 74,07.• Penurunan pengangguran terbuka dengan target TPT sebesar 5,40-3,81.• Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator tujuan persentase

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
		penduduk miskin target tahun 2024 pada RPJMD sekitar 10,56 -9,75.
4	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas RKPD tahun 2024 yang terkait dengan RPJMD adalah indicator Indeks Kesalehan Sosial, yang dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 63,98-64,06.
5	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan pangan daerah, dalam RPJMD tahun 2024 dapat berpijak dari target Skor Pola-Pangan Harapan sebesar 91,1.
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pijakan perumusan kebencanaan, pada dokumen RPJMD dipergunakan target Indeks Risiko Bencana sebesar 120,41 – 118,42.
7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban umum diselarakan dengan target Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 85. Kebijakan pelayanan publik, dimanifestasikan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 79,68 – 80,63

Penyelarasan Prioritas RKPD tahun 2024 dengan sasaran dan target RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 pada tabel di atas sebagai upaya untuk memastikan bahwa target dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang konsisten dengan sasaran dan target perencanaan tahunan.

Tabel 1.2

Keterkaitan RKPD tahun 2024 dengan RKP 2024

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RKP Tahun 2024
	<u>Tema RKPD 2024</u> <i>“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”</i>	<u>Tema RKP 2024</u> <i>“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”</i>
1	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pada dokumen RPJMD-P target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,71-6,34.
2	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Sebagai upaya mengukur penurunan kesenjangan, dipergunakan Indeks Theil dan Indeks Gini. Target Indeks Theil tahun 2024 sebesar 0,33161-0,31090 Sedangkan target Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,2943 - 0,3678
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM, diukur dengan IPM, dimana target IPM dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 72,85-74,07

No	RKPD Jawa Timur Tahun 2024	RKP Tahun 2024
		<ul style="list-style-type: none">• Penurunan pengangguran terbuka dengan target TPT sebesar 5,40 – 3,81• Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator tujuan persentase penduduk miskin target tahun 2024 pada RPJMD sekitar 9,90 – 8,80
4	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas RKPD tahun 2024 yang terkait dengan RPJMD adalah indikator Indeks Kesalehan Sosial, yang dalam RPJMD tahun 2024 ditargetkan sebesar 66,50-74,78
5	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Ketahanan pangan daerah, dalam RPJMD tahun 2024 dapat berpijak dari target Skor Pola-Pangan Harapan sebesar 91,1.
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Sebagai pijakan perumusan kebencanaan, pada dokumen RPJMD dipergunakan target Indeks Risiko Bencana sebesar 107,26-106,26
7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban umum diselaraskan dengan target Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebesar 85.• Kebijakan pelayanan publik, dimanifestasikan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25-80,75

RKPD tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam RKP tahun 2024. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur diselaraskan dengan tema pembangunan dan prioritas Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2024.

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak” yang telah diselaraskan dengan RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata” sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Selain itu, sebagai acuan untuk menentukan focus pembangunan tahunan, RKPD juga harus mengacu pada Arah Kebijakan Tahun 2024 RPJMD-P Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan

bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra

Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun sosial yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Provinsi.

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Pada proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD-P dapat terwujud secara optimal.

Sebagai upaya menjamin terlaksananya kegiatan tersebut dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan antar pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah (PD) dan pelaku pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, secara sinergis dan terintegrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
2. RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. Bilamana dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2024, terdapat peningkatan pendapatan, maka peruntukan belanjanya tetap difokuskan untuk mendukung pencapaian prioritas program, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024;
4. Setiap Perangkat Daerah pengampu Nawa Bhakti Satya sebagai program koordinatif prioritas gubernur (cross cutting program), diwajibkan untuk melakukan koordinasi secara dengan bidang terkait di Bappeda untuk memastikan Nawa Bhakti Satya telah dilaksanakan secara optimal.

Dalam hal pelaksanaan tahun berjalan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021. Renja disusun berdasarkan rencana strategis yang telah di tuangkan di dalam RENSTRA Dinas tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2024.

Surabaya, Juli 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROPINSI JAWA TIMUR**



I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.
Pembina Tk.I
NIP. 19690726 199903 1 006

RENJA 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.....	44
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	50
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	58
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	83
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN	114
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	114
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	115
3.3 Program dan Kegiatan.....	118
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	147
4.1 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2024.....	147
4.2 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	151
BAB 5 PENUTUP	158
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan	158
5.2 Rencana tindak lanjut	159

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2022</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur</i>	<i>58</i>
<i>Tabel 4. Draft Data Kekeringan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....</i>	<i>85</i>
<i>Tabel 5. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 yang di Akomodir</i>	<i>87</i>
<i>Tabel 6. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 yang tidak di Akomodir</i>	<i>108</i>
<i>Tabel 8. Dukungan Dinas pada Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan</i>	<i>115</i>
<i>Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024</i>	<i>117</i>
<i>Tabel 10. Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih</i>	<i>119</i>
<i>Tabel 11. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025</i>	<i>128</i>
<i>Tabel 12. Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi dan Program Icon Gubernur Tahun 2024.....</i>	<i>148</i>
<i>Tabel 13. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.....</i>	<i>151</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Dinas dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan;

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. penyusunan rancangan
- c. pelaksanaan forum /lintas bidang;
- d. perumusan rancangan akhir; dan
- e. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

25. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender.
27. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun RKPD 2024
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan,
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB V. PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja tahun 2022 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019-2024, Renstra Perubahan Pertama (KEDUA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 triwulan IV dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel terlampir.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran (DPPA) Rp. 181.972.352.954,- realisasi sebesar Rp.145.768.858.318,- atau 80,10 %. Dengan indikator kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak dengan target sebesar 97,89% dan tercapai sebesar 95,05%. Target dan capaian untuk indikator ini menggunakan perhitungan baru mengikuti perhitungan RPJMN 2019-2024. Realisasi cakupan pelayanan Air Minum belum mencapai target yang direncanakan karena perbedaan jumlah rumah tangga yang digunakan pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021 yang menyebabkan terjadinya penurunan .

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, dengan target kinerja jumlah RT yang terlayani akses air minum 2400 RT dan terealisasi 2400 RT. Sub kegiatan memiliki indikator:

- Jumlah dokumen supervisi sebanyak 5 dokumen yang terealisasi 5 dokumen

- Jumlah infrastruktur SPAM yang terbangun sebanyak 100 unit, dan terealisasi 87 unit, tidak mencapai target dikarenakan dari hasil perencanaan, terdapat beberapa lokasi yang tidak memiliki potensi air baku.
 - Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan sebanyak 2 unit dan terealisasi 2 unit
 - Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan pengelolaan SPAM ada 400 orang dan terealisasi 200 orang dikarenakan ada rencana pembinaan teknis sejenis yang juga dilakukan oleh anggaran APBN sehingga pembinaan teknis dilakukan sesuai kebutuhan.
2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Dengan anggaran Rp. 5.292.589.770,- realisasi sebesar Rp. 3.111.204.440,- atau 58,78 %. Indikator kinerja Persentase system persampahan regional yang dikembangkan dengan target sebesar 12,19% dan terealisasi sebesar 7,72%.
- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, yang memiliki indikator kinerja jumlah system persampahan yang dikembangkan terdapat 4 sistem dan yang terealisasi 4 sistem.yaitu Gks, Kediri, Blitar dan Probolinggo terdapat 4 Sub kegiatan yang memiliki indikator:
- Jumlah dokumen persampahan yang dibuat sebanyak 4 dokumen, dan terealisasi 4 dokumen.
 - Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun sebanyak 1 unit dan dan terealisasi 1 unit.
 - Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitasi Kerjasama sebanyak 11 Kab/Kota dan terealisasi 11 Kab/kota
 - Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan sebanyak 200 orang dengan realisasi 238 orang dikarenakan rencana pembinaan teknis yang semula paket fullboard dilakukan menjadi fullday sesuai kebutuhan
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan anggaran Rp. 8.982.630.184,- realisasi Rp. 8.029.632.065,- atau 89,39%. Dengan indikator kinerja : Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dengan target sebesar 83% dan terealisasi sebesar 81,13%. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah mempunyai 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, dengan indikator jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah dengan target 500 jiwa dan terealisasi 500 jiwa karena penetapan DPPA 2022 ditetapkan bulan Oktober 2022 sehingga tidak cukup waktu untuk proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan ada 3 indikator sub kegiatan, yaitu :
- Jumlah dokumen perencanaan kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen.
 - Jumlah infrastruktur air limbah dengan target terbangun 1 unit yang terealisasi 1 unit.

- Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik sebanyak 150 orang dan terealisasi 245 orang karena semula direncanakan mengundang 2 OPD utk masing-masing Kab/Kota namun dlm pelaksanaannya mengundang 4 OPD utk masing-masing Kab/Kota, hal ini juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran Rp. 141.467.391.092,- realisasi sebesar Rp. 132.548.481.640,- atau 93,70%. Dengan indikator kinerja Persentase system drainase regional yang dikembangkan dengan target sebesar 4,17% dan terealisasi sebesar 4,17%. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase mempunyai 1 kegiatan, yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, dengan indikator jumlah akses drainase terbangun dengan target 1000 meter dan terealisasi 1000 meter hal ini tidak dilaksanakan pembangunan karena tidak cukup waktu untuk proses PL melalui SPSE sehingga hanya bisa melaksanakan untuk perencanaan teknis saja. Memiliki sub kegiatan dengan indikator :
- Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase sebanyak 100 orang dan terealisasi 100 orang.
 - Jumlah infrastruktur drainase yang terbangun sebanyak 10 unit dan terealisasi 1 unit. Mengingat anggaran PAPBD disahkan pada akhir Oktober membuat tidak cukup waktu untuk proses PL melalui SPSE sehingga hanya bisa melaksanakan untuk perencanaan teknis saja.
1. Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp. 429.978.535.775,- realisasi sebesar 332.752.474.069,- atau 77,39 %. Indikator Program Penataan Bangunan Gedung yaitu Presentase penataan bangunan gedung sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91,67%. Program Penataan Bangunan Gedung mempunyai 1 kegiatan, yaitu Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah Gedung yang ditetaokan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi sebanyak 48 gedung dengan realisasi 44 gedung hal ini disebabkan ada 4 paket pekerjaan (Pemb gedung barbuk Kejati Jatim, Pemb. Gedung BKD Tahap 2, Pemb. Gedung inspektorat Tahap 3, Pemb. masjid Islamic Center) yang belum selesai dikerjakan di Tahun Anggaran 2022, sehingga diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan denda untuk dilaksanakan di Tahun 2023. Memiliki sub kegiatan dengan indikator
- Jumlah Gedung yang dibangun dengan target 22 gedung dan terealisasi 18 gedung
 - Jumlah gedung yang direhabilitasi dengan target 26 Gedung dan terealisasi 26 gedung,
 - Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur dengan target 150 laporan dan terealisasi 200 laporan.

Realisasi melebihi target karena instansi pemohon bantuan teknis melebihi dari yang direncanakan.

- Jumlah dokumen identifikasi bangunan Gedung cagar budaya dengan target 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen
- Jumlah dokumen pendataan rumah negara sebanyak 100 dokumen dengan realisasi 100 dokumen

2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, dengan anggaran Rp. 1.675.000.000,- realisasi sebesar 1.146.954.175 atau sebesar 68,47% dengan indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 20 %.

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah Kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan dengan target 2 kawasan dan terealisasi 2 kawasan dan memiliki sub kegiatan dengan indikator:

- Jumlah dokumen RTBL di Kawasan strategis Kab/Kota dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen
- Jumlah supervisi penataa/pemeliharaan bangunan dan lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL) dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen
- Jumlah dokumen monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan dengan target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp. 4.230.935.425,- realisasi sebesar Rp 3.575.541.578 atau sebesar 84,51%. dengan indikator kinerja presentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi bertarget 100% dan terealisasi 100 % dan indeks kepuasan pengguna jasa pengujian konstruksi dan bahan bangunan dengan target 82,5% dan terealisasi 83,05% hal ini melebihi target indikator program, karena terjadi peningkatan pelayanan pengujian.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai 2 kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, dengan indikator Jumlah orang yang mendapatkan pemberdayaan pembinaan jasa konstruksi sebesar 1250 orang dan terealisasi 1250 orang dengan indikator sub kegiatan:
 - Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan tenaga ahli konstruksi sebanyak 660 orang dan terealisasi 660 orang
 - Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 590 orang dan terealisasi 590 orang
- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi, dengan 2 indikator yaitu jumlah orang yang mendapatkan informasi pembinaan jasa konstruksi sebanyak 2085 orang dengan realisasi 2085 orang dan presentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan 80% terealisasi 100%. Realisasi sub kegiatan ini melebihi dari

target yang ditetapkan, sehingga berpengaruh kepada capaian kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga capaian kegiatan dianggap 100% didukung indikator sub kegiatan terdiri dari:

- Jumlah media informasi jasa konstruksi sebanyak 2000 buletin dan terealisasi 2000 buletin
 - Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan sebanyak 85 orang dengan realisasi 85 Orang
 - Jumlah pengujian yang diinformasikan ada 100 dokumen, terealisasi 220 dokumen. Realisasi sub kegiatan melebihi dari target yang ditetapkan, sehingga berpengaruh kepada capaian kegiatan di akhir tahun anggaran
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 9.198.070.000 dan terealisasi sebesar Rp 8.693.500.347,- atau sebesar 94,51%, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang sebesar 78 dan terealisasi 78. Hasil Capaian didapatkan dari hasil pengolahan kuesioner kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melihat kepuasan terhadap kinerja penyelenggaraan dan pembinaan penataan ruang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Metode penilaian kepuasan pelayanan ini baru saja dilaksanakan pada Tahun 2022, dan hasil penilaian kepuasan pelayanan dari Kabupaten/Kota sesuai target Tahun 2022.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, mempunyai 4 kegiatan yaitu :

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, dengan indikator kinerja presentase kebijakan rencana dan program dalam rangka pelaksanaan penataan ruang dengan target 60% dan terealisasi 60%, indikator sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yakni:
 - Presentase progress penetapan perda RTRW Provinsi dengan target 85% terealisasi 75% Pada Tahun 2022, Progres Penyusunan RTRW Provinsi Jawa Timur yakni Konsultasi Publik I, Integrasi dengan RZWP3K, rekomendasi peta dasar oleh BIG, Konsultasi Publik II, saat ini sedang menunggu validasi KLHS, integrasi RTRWP dan proses linsek.
 - Jumlah kebijakan rencana dan program dalam rangka pelaksanaan penataan ruang ada 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
 - Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang sebanyak 100 orang terealisasi 100 orang
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, dengan indikator jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang yang dilakukan sebanyak 10 kegiatan dengan realisasi 69 kegiatan. Indikator sub kegiatan jumlah dokumen evaluasi teknis rencana tata ruang Kab/kota ada 10 dokumen realisasi 69 dokumen. Kementerian ATR/BPN, Kemenko Marves, dan Kemendagri mendorong penetapan RTR di daerah dalam rangka percepatan investasi.

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi yang dilakukan dengan target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan.
 - Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun ada 2 dokumen dengan realisasi 2 dokumen.
 - Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan sebanyak 10 konten dan terealisasi sebanyak 10 konten.
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang ada 33 kegiatan dengan realisasi 33.kegiatan
 - Jumlah dokumen terkait pemberian intensif disentif bidang penataan ruang ada 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen
 - Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukumm bidang penataan ruang target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen
 - Jumlah kegiatan wasmalitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan) ada 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen
 - Jumlah pengawasan perizinan ada 30 lokasi yang terealisasi 30 lokasi
5. Program Pengembangan Permukiman dengan anggaran Rp. 6,343.628.625 dan terealisasi sebesar Rp 5.686.779.234,- atau sebesar 89,65% dengan indikator kinerja jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah provinsi ada 973 rumah tangga dan terealisasi 939 rumah tangga. Tidak sesuai dengan target yang direncanakan, karena adanya proses penertiban hunian rusunawa terkait pembayaran sewa dan keberadaan penghuni, sehingga terjadi kekosongan unit hunian, beberapa unit rusunawa yang termasuk ke dalam 973 unit adalah fasum/ruko, dan beberapa belum dimanfaatkan. Program Pengembangan Permukiman mempunyai 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja presentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara sebesar 100% dan realisasi 96,5%. Memiliki indikator sub kegiatan jumlah rusunawa yang dikelola dengan target 4 rusunawa terealisasi 4 rusunawa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 58.316.892.175,- realisasi sebesar Rp. 54.789.552.298,-atau 93,95% Dengan target indikator kinerja :
- Indeks Profesionalisme ASN sebesar 80 dan terealisasi sebesar 84,52% karena banyak diklat bimbingan teknis yang dipersyaratkan (2 tahun terakhir dan jumlah jam tertentu) yang diikuti oleh ASN di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
 - Presentase target Anggaran sebanyak 90% dan terealisasi sebanyak 88,17%

- Presentase Indikator Program yang Tercapai target sebesar 90,24% dan terrealisasi sebanyak 72,22% karena ada 7 indikator program yang tidak tercapai target.

Program penunjang ini terdiri dari 9 kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.921.518.420, realisasi sebesar Rp. 1.878.236.766,- atau 97,75%
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 39.182.110.500,- realisasi sebesar Rp. 36.901.004.394,- atau 94,18%
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 38.248.000,- realisasi sebesar Rp 28.102.300,- atau 73,47%
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 130.992.500,- realisasi sebesar Rp 127.919.872,- atau 97,65%
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.338.117.500,- realisasi sebesar Rp 1.226.198.750,- atau 91,64%
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 6.007.518.480,- realisasi sebesar Rp. 5.664.965.484,- atau 94,30%
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 1.533.730.500,- realisasi sebesar Rp 1.422.404.750,- atau 92,74%
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 6.855.134.104,- realisasi sebesar Rp 6.357.318.282,- atau 92,74%
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 1.309.522.171,- realisasi sebesar Rp 1.183.401.700,- atau 90,37%

Urusan Perumahan

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan anggaran Rp. 300,000,000 dan terealisasi sebesar Rp 298.383.000 atau sebesar 99,46% dengan indikator kinerja presentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan Kawasan permukiman di jatim target 3 % dengan realisasi 3 %

Program Pengembangan Perumahan, mempunyai 1 kegiatan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan indikator kinerja jumlah dokumen identifikasi dan pendataan rumha korban bencana atau relokasi program provinsi dengan target 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen. ada 3 sub kegiatan yang mendukung kinerja dengan indikator:

- Jumlah dokumen identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi dengan target kinerja 1 dokumen, dan terealisasi 1 dokumen
 - Jumlah dokumen identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dengan target kinerja 1 dokumen, dan terealisasi 1 dokumen
 - Jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen.
2. Program Kawasan Permukiman, dengan anggaran sebesar Rp. 46.930.633.690,- realisasi sebesar Rp. 46.586.392.818 atau sebesar 99,27% dengan indikator kinerja presentase penanganan kawasan permukiman kumuh dengan target 11 % dan terealisasi 11 %.

Program Kawasan Permukiman, mempunyai 2 kegiatan, yaitu :

- a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan indikator kinerja presentase Kawasan kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan target 7,46 Ha dan terealisasi 7,46.Ha. Dukungan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman target 3 laporan dan realisasi 3 laporan
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan indikator kinerja Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan target kinerja 8 Ha dan terealisasi sebesar 8 Ha. Terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini :
 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan indikator jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan target 6 dokumen realisasi 6 dokumen
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan indikator Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh dengan target 1156 meter terealisasi 1156 meter
 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan indikator Jumlah laporan monitoring pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni terdapat 7 dokumen dan terealisasi 7 dokumen
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan anggaran sebesar Rp. 544.563.003.310 dan terealisasi sebesar Rp. 525.992.231.831,98 atau

sebesar 96,59% dengan indikator kinerja presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU dengan target 21 % terealisasi 21%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, dengan indikator kinerja jumlah Kawasan permukiman yang terbangun PSU ada 22 kawasan yang terealisasi 22 kawasan. memiliki 3 sub kegiatan:

- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman yang berindikator Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya/Umum dan Komersial dengan target masing-masing 25 dan 4 dokumen yang terealisasi 25 dan 4 dokumen
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman berindikator Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun dengan target 5498 meter dan Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman umum dan Komersial yang dibangun target 1249 meter dan terealisasi 5498 dan 1249 meter
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya/umum dan komersial dengan masing-masing target 17 laporan dan 1 laporan dan terealisasi 14 dan 1 laporan tidak sesuai target karena kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Permukiman swadaya sudah terakomodir pada kegiatan sebelumnya.

Urusan Pertanahan

1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan anggaran Rp. 724.498.000,- realisasi sebesar Rp. 700.154.003 atau 96,64% Dengan indikator kinerja Presentase pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, dengan indikator kinerja Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diterbitkan 20 dokumen dan terealisasi 20 dokumen. sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan indikator Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 20 dokumen
2. Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp. 1.114.800.000,- realisasi sebesar Rp. 964.604.492 atau 86,53% Dengan indikator kinerja Persentase dokumen penatagunaan tanah yang telah tersusun sebesar 62% dan terealisasi sebesar 62%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah sebanyak 2

dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dengan indikator Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan

3. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan anggaran Rp 223.832.000 realisasi sebesar Rp 180.682.910 atau 80,72% dengan indikator presentase pelaksanaan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 daerah provinsi bertarget kinerja 100% terealisasi 100%. program ini memiliki 1 kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi ada 10 kasus dan terealisasi 10 kasus. ada 2 sub kegiatan yakni :

- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berindikator Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen
- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan dengan target 5 kegiatan terealisasi 5 kegiatan

Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan program / kegiatan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu :

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan :

- a. Terdapat desa/lokasi kegiatan fisik pembangunan SPAM yang tidak terdapat potensi sumber air baku, minim sumber air baku bahkan apabila dilakukan pengeboran tanah tidak ada potensi dan tidak bisa dijadikan alternatif
- b. Proses lelang pekerjaan pada kenyataannya membutuhkan waktu lama dalam proses review, sehingga pelaksanaan kegiatan (terutama pekerjaan konstruksi, seperti pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah) menjadi terlambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.
- c. Terdapat 4 Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung yang belum selesai dilaksanakan di tahun 2022 karena kompleksitas sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran dan pencapaian target rencana output.
- d. Pada Tahun 2022, Progres Penyusunan RTRW Provinsi Jawa Timur yakni Konsultasi Publik I, Integrasi dengan RZWP3K, rekomendasi peta dasar oleh BIG, Konsultasi Publik II, saat ini sedang menunggu validasi KLHS, integrasi RTRWP dan proses linsek.

Upaya Pemecahan Permasalahan :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan PU SDA terkait ketersediaan air baku.

- b. Melaksanakan kolaborasi pendanaan dengan pemerintah pusat, CSR, dan swadaya masyarakat.
- c. Koordinasi percepatan proses pengadaan dengan bagian pengadaan barang/jasa
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur, sehingga konstruksi pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan di daerah.
- e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi konstruksi fisik pembangunan gedung, sehingga diharapkan konstruksi fisik pembangunan Gedung dapat selesai di waktu yang telah direncanakan. Apabila tidak selesai sampai dengan akhir tahun, maka dapat diberikan kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan persyaratan menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaan, sehingga sisa fisik yang belum dibayarkan akan dicairkan pembayarannya di PAPBD (PAK) Tahun 2022.
- f. Meningkatkan koordinasi dalam percepatan validasi KLHS, integrasi RTRWP dan proses linsek.

Urusan Perumahan

Permasalahan :

1. Pada kegiatan Penyediaan PSU masih terdapat sisa anggaran karena waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan fisik (DPA P-APBD disahkan di Bulan Oktober), sehingga pada Tahun 2022 hanya dilaksanakan perencanaannya saja.
2. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Permukiman swadaya sudah terakomodir pada kegiatan sebelumnya
3. Luasan Kawasan kumuh yang besar (baseline baru), sehingga belum dapat menangani permukiman kumuh secara menyeluruh, karena penanganan Kawasan kumuh memerlukan biaya yang besar dan sinergitas dan keterpaduan dari berbagai pihak dan sektor di tingkat pusat hingga daerah.

Upaya Pemecahan Permasalahan :

1. Meningkatkan percepatan perencanaan sehingga pembangunan fisik bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai tahun anggaran berjalan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara berbagai sektor, pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh.

Secara garis besar, target-target pada Tahun 2022 dapat dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target dikarenakan karena :

1. Secara garis besar beberapa kegiatan pembangunan mengalami kendala ketidakcukupan waktu untuk melaksanakan pembangunan fisik dikarenakan DPPA-PAPBD Tahun Anggaran 2022 baru disahkan pada akhir bulan oktober tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022 beberapa kegiatan pembangunan hanya dilaksanakan perencanaannya saja yang menyebabkan terdapat sisa anggaran yang cukup besar. Kendala juga terjadi akibat adanya keterlambatan dalam proses pengadaan sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pembangunan fisik.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2022

FORM 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 Triwulan II	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks profesionalitas ASN	90,62	46,57					46,57	51%
		Persentase realisasi anggaran	90	77,97					77,97	87%
		Persentase indikator program yang tercapai	80	75					75	94%
1.03.01.003	Ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian yang tersusun	18	3					3	17%
1.03.01.002	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	30	5					5	17%
1.03.01.001	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran PD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun	54	9					9	17%
1.03.34	Program Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	80	60					60	75%
		Persentase Kesesuaian Implementasi Sektor Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang	90	100					100	111%
		Persentase Pemberian Rekomendasi Gubernur terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	95	77					77	81%
1.03.34.001	Pelayanan Informasi Penataan Ruang	jumlah informasi tata ruang yang sudah dipublikasikan	50	1					1	2%
1.03.34.002	Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi	Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun	5	1					1	20%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 Triwulan II	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.34.003	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program pembangunan terhadap rencana tata ruang	5	1					1	20%
1.03.34.004	Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kot dalam rangka rekomendasi gubernur	32	6					6	19%
		Jumlah dokumen evaluasi teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kot dalam rangka rekomendasi gubernur	65	10					10	15%
1.03.34.005	Pemanfaatan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan	25	23					23	92%
		Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi	125	20					20	16%
1.10.21	Program Pertanahan	Presentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah disusun	100	20					20	20%
1.10.21.001	Inventarisasi Data Pertanahan	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun	5	2					2	40%
1.04.19	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	90,68	95,79					95,79	106%
		Jumlah backlog kepemilikan rumah	6690000	1348390					1348390	20%
1.04.19.001	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	72	10,94					10,94	15%
1.04.19.002	Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun	100	20	20	20%				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 Triwulan II	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun	5	0					0	0%
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun	50000	6906					6906	14%
1.04.19.003	Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun	25	0					0	0%
		Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun	10	0					0	0%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun	25	3					3	12%
1.03.35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	85	70,31					70,31	83%
		Persentase cakupan pelayanan akses air minum	88	80,43					80,43	91%
1.03.35.001	Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air limbah dan Drainase	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun	75	4					4	5%
		Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun	75	0					0	0%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase	1800	0					0	0%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun	50	2					2	4%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 Triwulan II	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase	15	1					1	7%
1.03.35.002	Penyelenggaraan Sistem Persampahan	Jumlah dokumen perencanaan Persampahan yang tersusun	5	2					2	40%
		Jumlah infrastruktur Persampahan yang terbangun	2	0					0	0%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang Persampahan	1800	50					50	3%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun	50	1					1	2%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan Persampahan	15	3					3	20%
1.03.35.003	Penyelenggaraan Sistem penyediaan air minum	Jumlah dokumen perencanaan Air minum yang tersusun	376	27					27	7%
		Jumlah infrastruktur Air minum yang terbangun	376	88					88	23%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang Air minum	1800	2400					2400	133%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi Air minum yang tersusun	50	2					2	4%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan Air minum	15	3					3	20%
1.03.33	Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	100	100					100	100%
1.03.33.001	Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	2500	280					280	11%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 Triwulan II	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.33.002	Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Jumlah gedung yang terbangun	22	19					19	86%
1.03.33.003	Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	1500	541					541	36%
1.03.36	Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	81	82,56					82,56	102%
1.03.36.001	Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah orang yang terlayani akses informasi	67100	18808					18808	28%
1.03.36.002	Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani	660	274					274	42%
1.03.36.003	Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola	5514	973					973	18%

FORM 2021-2022

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	Persen	90,15		80,81	80,97	100,20	83,56	80,82	90%
		Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	Persen	80					50	100	125%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	Persen	75,44		68,57	66,93	97,61	69,8	66,28	88%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan akses air minum	Persen	80,43		81,60	95,02	116,45		95,02	118%
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Persen	100					97,89	95,05	97%
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun	Dokumen	89		89	89	100		89	100%
		Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun	Unit	80		80	76	95		76	95%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum	Orang	50		50	0	0		0	0%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun	Dokumen	2		2	1	50		1	50%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum	Kegiatan	3		3	0	0		0	0%
		Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Rumah Tangga	10521516						10523916	10523916

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi	dokumen	18		2	2	100	5	7	39%
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	Unit	250		80	76	95	100	163	65%
1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan	Unit	11		2	2	100	2	4	36%
1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM	Orang	450,00		50,00	0,00	0	400	200	44%
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen	70,31		76,92	80,97	105,27		80,97	115%
		Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Persen	21,50					12,19	7,72	46%
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun.	dokumen	3		3	3	100		3	100%
		Jumlah infrastruktur persampahan yang tersusun.	unit	0		0	0	0		0	0%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang persampahan.	orang	200		200	200	100		200	100%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun.	dokumen	0		0	0	0		0	0%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan.	kegiatan	4		3	0	0		0	0%
		Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	sistem	4						4	4
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan	dokumen	16		3	3	100	5	7	44%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	Unit	2					1	1	50%
1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Kab/kota	11		11	11	100	11	11	100%
1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan	orang	650		200	200	100	200	438	67%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen	70,31		76,92	80,97	105,27		80,97	115%
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	95					83,00	81,13	91%
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	6		6	5	83,33		5	83%
		Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun	unit	5		5	6	120,00		6	120%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase	orang	240		240	0	0,00		0	0%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	0		0	0	0,00		0	0%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase	kegiatan	3		3	3	100,00		3	100%
		Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	jiwa	35641908						40879289	33070941
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen	12		3	3	100	3	6	50%
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah	unit	9		7	6	85,71	1	6	67%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik	orang	640		150	0	0	150	245	38%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen	70,31		76,92	80,97	105,27			
		Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Persen	0					4.17%	4,17	50%
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	2		2	2	100,00		2	100%
		Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun	unit	2		2	2	100,00		2	100%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase	orang	120		120	120	100,00		120	100%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun	dokumen	0		0	0	0,00		0	0%
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase	kegiatan	3		3	3	100,00		3	100%
		Jumlah akses drainase terbangun (meter)	meter	3000					1.000	0	0%
1.03.06.1.01.03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase	orang	670		120	120	100	100	220	33%
1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur drainase	paket	13		2	2	100	10	2	15%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	Persen	82		82	84,5	103,05		84,50	103%
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	rumah tangga	973					973	973	100%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola	Unit	973		973	973	100,00		973	100%
		Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Persen	100					100	96,50	97%
1.03.07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dipelihara	rusunawa	4		4	4	100		4	100%
		Jumlah Rusunawa yang dikelola	rusunawa	4					4	4	100%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	persen	100		100,00	93,88	93,88		93,88	94%
		Presentase Penataan Bangunan Gedung	persen						100	91,67	91,67%
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	gedung	220		220	220	100		220	100%
		Jumlah gedung yang terbangun	orang	30		30	27	90		27	90%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	orang	1200		1200	1200	100		1200	100%
		jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	gedung	20						48	44
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung	gedung	11		11	8	72,73		8	73%
		Jumlah gedung yang dibangun	gedung	28		19	0	0,00	22,00	18,00	64%
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Jumlah gedung yang direnovasi	gedung	19		150	19	12,67		19	100%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang direhabilitasi	gedung	28		220	0	0,00	26	26	93%
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	Laporan	150		150	150	100		150	100%
		Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	Laporan	450					150	200	44%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	orang	1210		220	220	100,00	220	440	36%
1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen identifikasi bangunan gedung cagar budaya	Dokumen	5					5	5	100%
		Jumlah gedung cagar budaya yang ditetapkan dan direhabilitasi	gedung	6					0	0	0%
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara	dokumen	280		100	100	100	100	200	71%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	persen	100		100	93,88	93,88		93,88	94%
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	persen	33,33			0		20	20	60%
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung	orang	220		220	220	100		220	100%
		Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	6					2	2	33%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN		
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)	
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/ kota	dokumen	8		2	2	100	2	4	50%	
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	Dokumen	6					2	2	33%	
1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	6					2	2	33%	
1.03.11.1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persen	100		100	93,88	93,88		93,88	94%	
		Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Persen	100					100%	100	100%	
		Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman		82			82	84,5	103,05		84,50	103%
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan		83						83	83	100%
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	orang	1200		1200	1200	100		1200	100%	
		Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	orang	4090					1.250	1.250	31%	
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	orang	3790		900	900	100	660	1.560	41%	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan	orang	1500		300	300	100	590	890	59%
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi	orang	1200		1200	1200	100		1200	100%
		Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	orang	4275					2.085	2.085	49%
		Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani	Pengujian	100		100	269	269		269	269%
		Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80%					80%	100%	125%
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi	buletin	6020		2000	2000	100	2.000	4000	66%
1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan	orang	340		85	85	100	85	170	50%
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pengujian yang diinformasikan	dokumen	400		100	269	269	100	489	122%
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	Persen	90		60	87,6	146	88	92,53	103%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang		80		56	61,75	110,27	78	78	98%
		Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Persen	80		80	80	100		80	100%
		Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Persen	100		90	100	111,11		100	100%
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana	Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun	RTR	1		1	1	100		1	100%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	80%					60%	60%	75%
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	Persen	100		75	50	67	85%	75	75%
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1					1	1	100%
1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penyusunan dan penetapan RTR Kab/Kota	orang	80		80	75	94		75	94%
		Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang (2022-2024)	orang	383					100	100	26%
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)	Dokumen	5		5	20	400		20	400%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur	Dokumen	9		9	35	389		35	389%
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Kegiatan	32					10	69	216%
1.03.12.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen RRTR Provinsi yang disusun	dokumen	1		1	1	100	0	1	100%
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kota	dokumen	5		5	20	400		20	400%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	dokumen	9		9	35	389		35	389%
		Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	32					10	69	216%
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	dokumen	1		1	1	100		1	100%
		Jumlah informasi tata ruang yang dipublikasikan	informasi	10		10	10	100		10	100%
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Kegiatan	6						2	2
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun	dokumen	4		1	1	100	2	3	75%
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	konten	31		10	11	110	10	21	68%
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan	IPR	10		10	29	290		29	290%
		Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi	IPR	25		25	25	100		25	100%
		Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kegiatan	112						33	33
1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	dokumen	1					1	1	100%
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	3					1	1	33%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan)	dokumen	3					1	1	33%
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan	IPR	10		10	29	290		29	290%
		Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi	IPR	25		25	25	100		25	100%
		Jumlah pengawasan perizinan	Lokasi	105						30	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	100		83,9	100	119		100	100%
		Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	unit	1345500		1345500	1115609	83		1.115.609	83%
		Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Persen	6						3,00	3,00
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun	dokumen	12		12	12	100		12	100%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun	dokumen	0		0	0	0		0	0%
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun	meter	5000		5000	7810	156		7.810	156%
		Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	16						3	3
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	dokumen	9		4	4	100	1	5	56%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan- lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	6					1	1	17%
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	Dokumen	5					1	1	20%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Penanganan Kawasan Peremukiman Kumuh	persen	100		83,9	100	119		100	100%
		Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	unit	1345500		1345500	1115609	83		1.115.609	83%
		Persentase Penanganan Kawasan Peremukiman Kumuh	persen	12,18					11%	11	90%
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	14		14	12,85	92		12,85	92%
		Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	36,57					7,46	7,46	20%
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	5		1	1	100	3	4	80%
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	41		14	12,85	92	8	20,85	51%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	dokumen	26		11	11	100	6	17	65%
1.04.03.1.02.04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni	dokumen	37		12	12	100	7	19	51%
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	meter	4431		2000	7810,11	391	1156	8.966,11	202%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	persen	100		83,90	100	119		100	100%
		Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	unit	1.345.500		1345500	1115609	83		1.115.609	83%
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	persen	24					21%		21
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun	dokumen	12		12	12	100		12	100%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun	dokumen	0			0	0		0	0%
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun	meter	5000		5000	11969,49	239		11.969,49	239%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun	dokumen	0		0	0	0		0	0%
		Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun	unit	3		2	2	100		2	67%
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun	dokumen	0		0	0	0		0	0%
		Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Kawasan	72						22	22
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya	dokumen	32		12	12	100	25	37	116%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Umum dan Komersial	dokumen	11		3	3	100	4	7	64%
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun	meter	7912		2500	9492,46	380	5.497,95	14.990,41	189%
		Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman umum dan Komersial yang dibangun	meter	5151		2500	2477,13	99	1.249	3.726,13	72%
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	Laporan	5		1	1	100	17	15	300%
		Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Umum dan Komersial	Laporan	4		1	1	100	1	2	50%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN											

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen	40		40	40	100		40	100%
		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	100					100%	100	100%
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun	Dokumen	1		1	2	200		2	200%
		Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Dokumen	60					20	20	33%
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen Penetapan lokasi	dokumen	20		20	20	100		20	100%
		Jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	dokumen	60					20	20	33%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persen	100					100%	100	100%
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Kasus	60					10	10	17%
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	3					1	1	33%
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan	Kegiatan	60					5	5	8%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen	38		38	38	100		38	100%
		Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Persen	100					62	62	62%
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun	dokumen	2		1	2	200		2	100%
		Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	dokumen	8					2	2	25%
2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen pertanahan	dokumen	2		2	2	100		2	100%
		Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	kegiatan	8					2	2	25%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Persen	89,09		86,84	84,37	97,16	88	85,11	96%
1.03.01 / 1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN		85		77	65	84	80	84,52	99%
		Presentase realisasi anggaran	Persen	90		90	92,9	103	90%	88,17	98%
		Persentase indikator program yang tercapai	Persen	90,62		90,05	83,33	93	90,24%	66,67	74%
		Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman		82		82	84,50	103		84,50	103%
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	23		14	14	100		14	61%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	dokumen	16					4	4	25%
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah (2022-2024)	dokumen	22					7	7	32%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	36		11	11	100	7	18	50%
X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	3		1	1	100	1	2	67%
X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	dokumen	3		1	1	100	1	2	67%
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	dokumen	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	dokumen	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	dokumen	18		3	3	100	5	8	44%
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	dokumen	16		4	4	100	4	8	50%
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (TU)	Dokumen	36		5	5	100	12	17	47%
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)		36					12	12	33%
		Jumlah orang yang terlayani akses informasi	orang	192000		192.000	272.515	142		272.515	142%
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	12		12	12	100		12	100%
			Dokumen	36					12	12	33%
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	48		12	12	100	12	24	50%
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	48		12	12	100	12	24	50%
X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	laporan	48		12	12	100	12	24	50%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Keuangan SKPD										
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	48		12	12	100	12	24	50%
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	8		2	2	100	2	4	50%
X.XX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	36		12	12	100	12	24	67%
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	3		1	1	100	1	2	67%
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	3		3	3	100		3	100%
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	36					12	12	33%
X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	laporan	24					12	12	50%
X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah	Laporan	1		1	1	100		1	100%
		Jumlah laporan	Laporan	2					1	1	50%
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan	8					4	4	50%
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah	dokumen	2		2	2	100		2	100%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah Laporan	laporan	4					2	2	50%
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	laporan	5		5	5	100		5	100%
		Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	dokumen	36					12	12	33%
X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Retribusi Daerah	laporan	12		12	12	100		12	100%
		Jumlah Laporan Retribusi	Laporan	24					12	12	50%
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	9		3	3	100	3	6	67%
X.XX.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	laporan	12		12	12	100		12	100%
		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	paket	24					12	12	50%
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	paket	2		1	1	100	0	1	50%
X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	48		12	12	100	12	24	50%
X.XX.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	36		12	12	100	12	24	67%
X.XX.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	36		12	12	100	12	24	67%
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	2					1	1	50%
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	3		3	3	100		3	100%
		Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Dokumen	77					11	11	14%
		Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	orang	192000		192.000	272.515	142	11	272526	142%
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
x.xx.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	3		1	1	100	1	2	67%
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	121		1	1	100	40	41	34%
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen	2		2	2	100		2	100%
		Jumlah Daftar Arsip Aktif	Dokumen	9					3	0	0%
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	3		3	3	100		3	100%
		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	33					11	11	33%
		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	orang	192000		192.000	272.515	142	11	272526	142%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit	8		2	2	100	2	4	50%
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit	2					0	0	0%
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	unit	1		1	1	100	0	1	100%
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	5		2	2	100	1	3	60%
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3		3	3	100		3	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	36					12	12	33%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	orang	192000		192.000	272.515	142	12	272527	142%
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket	1		1	1	100		1	100%
		Jumlah Pengiriman Dokumen	paket	3					1	1	33%
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat/Dokumen	Paket	1		1	1	100		1	100%
		Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	3		1		0	1	1	33%
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12		12	12	100	12	24	200%
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa (2021)	Paket	1		1	1	100		1	100%
		Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	24					8	8	33%
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa (2021)	Paket	1		1	1	100		1	100%
		Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	3					1	1	33%

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (2021-2022)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024 (REVIEW RENSTRA P1)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA TAHUN BERJALAN	
						TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	3		3	3	100		3	100%
		Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	36					12	12	33%
		Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	orang	192000		192.000	272.515	142	12	272527	142%
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Paket	35		11	11	100	8	19	54%
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	6		3	3	100	1	4	67%
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	6		3	3	100	1	4	67%
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	4		1	1	100	1	2	50%
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	paket	1					1	1	100%
X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	paket	3		0	0	0	1	1	33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam NSPK, SPM dan IKK sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni, dengan definisi operasional merupakan rerata persentase capaian pekayanan akses air minum, persentase cakupan pelayanan sanitasi layak dan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh kinerja program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dan Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jenis Indikator yang dikaji berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur antara lain terkait dengan persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, persentase cakupan pelayanan akses sanitasi aman dan air minum layak, dan persentase penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD Dinas	IKU Dinas	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Keterangan
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar dan permukiman yang layak huni	V		V				78.14%	78.44%	80.81%	83.56%	86.85%	90.15%	80.83%	82.18%	*) 80.97%	*)80,82%	86.85%	90.15%	*)Sesuai dengan perhitungan BPS (perbedaan jumlah penduduk)
2	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	V		V				-	-	-	50%	60%	80%	-	-	-	100%	60%	80%	Merupakan indikator tujuan baru (2022-2024)
3	Persentase KK yang memiliki rumah		V					78.57%						87.58%						
4	Persentase rumah layak huni		V					81.17%						98.68%						
5	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh		V					22.15%						18.67%						
6	Persentase kesesuaian rencana tata ruang		V		V				50%	60%	88%	89%	90%		55.97%	87.60%	92,53%	89%	90%	
7	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni		V		V				44.84%	68.57%	69.80%	72.62%	75.44%		68.08%	*) 66.93%	*)66,28%	72.62%	75.44%	*)Berdasarkan perhitungan BPS (perbedaan jumlah penduduk)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD Dinas	IKU Dinas	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Keterangan
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah		V						86.09%	86.84%	87.59%	88.34%	89.09%		84.35%	84.37%	85.11%	88.34%	89.09%	
9	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota)					V		2.25%	26.28%	33.06%	58.06%	86.97%	100%	2.19%	23.32%	88.82% *)	86,31*)	93,84% *)	100% *)	*)Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun
10	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional					V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Belum memiliki SPAL Regional, tahun 2021 masih Menyusun dokumen RISPAL
11	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan					V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.82%	100%	100%	Tahun 2022 telah ditangani rumah korban bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang, tanah gerak di

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD Dinas	IKU Dinas	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Keterangan
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	ditangani pada tahun																			Jember, dan tanah longsor di Trenggalek. Dari seluruh rumah yang harus ditanagni sebanyak 3944 unit, berhasil ditangani sebanyak 3661 unit rumah.
12	Persentase rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima					V		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan relokasi dari tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD Dinas	IKU Dinas	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Keterangan
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	pelayanan																			
13	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota						V		26.28%	33.06%	58.06%	86.97%	100%		23.32%	88.82%*)	86,31%*)	93,84%*)	100%*)	*)Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun, tahun 2022 reservoir 300m2 masih belum dimanfaatkan
14	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani						V		81.64%	83.90 %	11.00%	11.56%	12.18%		95.79%	100 %	11 %	11.56%	12.18%	Pada Tahun 2022, perhitungan penanganan kawasan kumuh didasarkan pada base line terbaru, karena pada Tahun 2021 penanganan kawasan kumuh sesuai

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tujuan	Sasaran	IKD Dinas	IKU Dinas	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Keterangan
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
																				dengan base line lama sudah tercapai 100%
15	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU						V		9%	13%	22%	24%	26%		8.19%	13%	21%	22%	24%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan, solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Isu strategis menjabarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan pelayanan daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional maupun internasional, seperti SPM dan SDG's; serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah berkontribusi dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar public pendukung pertumbuhan wilayah, yang secara rinci isu-isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Isu Strategis terkait yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

1. Belum optimalnya pemenuhan data pelayanan air minum, air limbah, dan drainase sehingga menyebabkan perencanaan yang dilakukan belum bisa memenuhi kebutuhan dan kondisi real di lapangan secara maksimal.
2. Capaian pelayanan air minum yang layak Jawa Timur sampai dengan Tahun 2022 mencapai 97,95% dan sanitasi 81,13%, sedangkan luas kawasan kumuh yang tertangani sampai tahun 2022 seluas 23,794 Ha dengan baseline baru dari 1.905,53 Ha yang menjadi kewenangan provinsi. Masih ada daerah rawan kekeringan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan air bersih.
3. Belum optimalnya pemenuhan data terkait perumahan dan permukiman, sehingga menyebabkan perencanaan yang dilakukan belum bisa memenuhi

- kebutuhan dan kondisi real di lapangan secara tepat.
4. Terbatasnya sumber daya untuk pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perencanaan tata ruang, baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
 6. Belum optimalnya proses penetapan RUTR/RRTR (Rencana Umum Tata Ruang/ Rencana Rinci Tata Ruang) yang terkendala oleh substansi perpetaan yang perlu mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial.
 7. Pada penyusunan rencana rinci terdapat ketidaksesuaian muatan dengan kebijakan pada rencana umum.
 8. Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan-kebijakan yang dijadikan rujukan perencanaan tata ruang.
 9. Reforma agrarian (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/ Kota belum tertangani dengan optimal
 10. Keterbatasan dokumen pertanahan dan penyelesaian (Mediasi) sengketa/ konflik/ perkara tanah garapan

b. Isu Percepatan Penerapan SPM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No.59 tahun 2021 tentang penerapan Standar pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota,
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari persentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,
- b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.
- c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.
- d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
- e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

c. Isu Kesetaraan Gender

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel

dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 66 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 39 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, setiap OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengatasi berbagai kesenjangan baik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ingin mengukur seberapa besar akses yang diberikan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok disabilitas, kelompok lansia dan kelompok –kelompok lainnya. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan responsive gender dalam pembangunan Jawa Timur diantaranya:

1. Perencanaan dalam bangunan Gedung terdapat ruang laktasi, pemisahan area utilitas (Kamar mandi/WC) antara laki-laki dan perempuan, KM/WC kaum difable yang didesain khusus, tempat parkir untuk perempuan dan difable yang lebih dekat dengan entrance, ramp dan railing, tempat bermain anak-anak, akan tetapi tidak semua Gedung menerapkan hal tersebut.
2. Partisipasi kaum perempuan baik dari segi penerima manfaat dan pelaku dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti KOTAKU (penanganan Kawasan kumuh), Pamsimas dan Sanimas/ Sandes, TPS3R.
3. Pembangunan penyediaan sarpras air bersih seperti pipanisasi dari sumber air ke rumah penduduk untuk mempermudah jangkauan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, sanitasi (drainase, persampahan, air limbah domestik,

MCK) untuk kemudahan jangkauan akses utilitas dan jalan lingkungan yang mempermudah mobilisasi dalam melakukan kegiatan/ aktivitas.

Atas upaya dan komitmen terhadap Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2021 yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri telah memiliki Tim Pengarusutamaan Gender. Tim ini (Tim Focal Point Gender) terdiri dari beberapa staf di dalam Dinas yang tugasnya :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif Gender
3. Mempersiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan
4. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim
5. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja
6. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Ketua Kelompok kerja.

d. Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Melalui Perpres 80 tahun 2019

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden melalui PERPRES Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan secara maksimal laju pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan banyak program-program kegiatan yang bisa di laksanakan. Pendanaan yang tertuang di dalam program-program tersebut, berasal dari empat sumber yaitu, APBN, APBD, KPBU serta sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan. Dengan adanya Perpres ini diharapkan iklim investasi dapat meningkat secara signifikan dan semua kegiatan masyarakat dapat terpadu dengan saling terkoneksi

antar sektor baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, gambaran pembangunan yang di harapkan terjadi adalah untuk kawasan Gerbangkertosusila akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik. Sedangkan untuk pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo.

Dalam Perpres 80 tahun 2019, terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum Keciaptakaryaan-Penataan Ruang serta Perumahan, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 itu antara lain :

1. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik.
2. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
3. Pembangunan SPAM Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
4. Peningkatan SPAM Brondong, Kabupaten Lamongan
5. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan
6. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Mojolagres di Kab. Lamongan

ESTIMASI PROYEK PERPRES 80/2019 TAHAP KONSTRUKSI YANG SELESAI TAHUN 2022, 2023, 2024

No	Tahun 2022	No	Tahun 2023
1	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya Target selesai bulan Desember 2022 (APBN)	1	Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan (Sidoarjo, Sby, Gresik)

f. Isu Strategis Penerapan Perpu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Pada Tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Perpu No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan Perpu Cipta Kerja, yang ditetapkan sebagai pengganti dari UU Cipta Kerja, Perpu tersebut mengubah beberapa peraturan sebelumnya diantaranya:

- UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi
- UU No 9/2015 Tentang Perubahan ke-2 atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- UU No 26/2007 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 28/2022 Tentang Bangunan Gedung
- UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20/2011 Tentang Rumah Susun
- UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun tujuan besar diberlakukannya Perpu No 6 Tahun 2023 (Perpu Cipta Kerja) adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional
4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.
5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perpu Cipta Kerja menagtur mengenai kebijakan strategis yang meliputi :
 - a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
 - b. Ketenaga kerjaan
 - c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
 - d. Kemudahan berusaha
 - e. Dukungan riset dan inovasi
 - f. Pengadaan tanah
 - g. Kawasan ekonomi
 - h. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
 - i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan
 - j. Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Perpu ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka Perpu

Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

1. Perijinan berbasis RDTR
2. Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang
3. Percepatan penetapan RTRW dan RDTR

Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UUCK dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

1. Perubahan perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
3. Penambahan klausul bantek dan bintek;
4. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
5. Penghapusan klausul penyebarluasan informasi APZ Nasional;
6. Kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot terhadap KSP dan KSK dihapus, termasuk RTR KSP dan KSK dihapus dari nomenklatur rencana rinci tata ruang;
7. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
8. Proses perencanaan RDTR tanpa porses legislasi (ditetapkan melalui Perkada);
9. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub
10. Pertimbangan Pertimbangan KSP dan KSK terhadap RTRW Prop dan RTRW Kab/Kota dihapus;
11. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
12. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
13. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
14. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
15. Pembatasan akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tidak lagi diberi sanksi pidana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	100%	322.648.272.000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	100%	74.250.000.000
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	2400 RT	322.648.272.000	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	2400 RT	74.250.000.000
	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaran SPAM	4 dokumen	17.000.000.000	1.03.03.1.01.015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 dokumen	2.330.000.000
	1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 dokumen	167.500.000					
	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	22 lt/dt	279.030.772.000	1.03.03.1.01.017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	42 Liter/Detik	71.720.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	30.000 SR	26.000.000.000					
	1.03.03.1.01.08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	28 Kab/Kota	450.000.000,00	1.03.03.1.01.016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150 Orang	200.000.000
2	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	21,50%	51.325.000.000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	21,50%	3.000.000.000
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	4 sistem	51.325.000.000	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	4 sistem	3.000.000.000
	1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 dokumen	1.925.000.000	1.03.04.1.01.016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	6 Dokumen	1.600.000.000
	1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	1 unit	48.300.000.000	1.03.04.1.01.013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	0,5 Ton/hari	700.000.000
	1.03.04.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	4 dokumen	1.000.000.000	1.03.04.1.01.012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	4 Kabupaten/Kota	500.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50 Kelompok Masyarakat	100.000.000	1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	200.000.000
3	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	95%	3.275.000.000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	95%	1.980.000.000
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	500 jiwa	3.275.000.000	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	500 jiwa	1.980.000.000
	1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	2 Dokumen	1.125.000.000	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	500.000.000
	1.03.04.1.01.06	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	90 RT	2.000.000.000	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	18 M ³ /Hari	1.280.000.000
	1.03.04.1.01.08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 Kelompok Masyarakat	150.000.000	1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	200.000.000
4	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	8,33%	1.950.000.000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	8,33%	1.200.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	1000 meter	1.950.000.000	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	1000 meter	1.200.000.000
	1.03.06.1.01.03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	300 orang	450.000.000					
	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	3 unit	1.500.000.000	1.03.06.1.01.008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.200.000.000
5	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	973 RT	10.313.747.000					
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	100%	10.313.747.000					
	1.03.07.1.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	5 sistem jaringan	10.313.747.000					
6	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100%	247.910.775.370	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100%	396.847.169.280

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	20 gedung	247.910.775.370	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	23 gedung	396.847.169.280	
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	10 dokumen	155.209.500.000	1.03.08.1.01.019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	15 Dokumen	371.120.273.000	
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	10 Gedung	12.111.500.000	1.03.08.1.01.016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	8 Bangunan Gedung	15.535.727.000	
1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	150 dokumen	40.843.000.000	1.03.08.6.01.009	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	220 Orang	1.400.000.000	
1.03.08.1.01.05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	3 Gedung	1.100.000.000	1.03.08.1.01.014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	200.000.000	
1.03.08.1.01.10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	10 dokumen	37.421.775.370	1.03.08.1.01.013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	15 Rumah Negara	721.711.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1.03.08.1.01.020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung	7.869.458.280
7	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	33,33%	1.575.000.000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	33,33%	850.000.000
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	2 kawasan	1.575.000.000	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	2 kawasan	850.000.000
	1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	1.500.000.000	1.03.09.1.01.009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	775.000.000
	1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 kawasan	50.000.000	1.03.09.1.01.010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	2 Dokumen	75.000.000
	1.03.09.1.01.07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 dokumen	25.000.000					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100%	4.002.724.630	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100%	1.678.289.000
			Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	83	637.912.000			Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	83	722.838.000
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	260 orang	3.591.090.760	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	190 orang	1.288.724.000
						1.03.11.1.01.010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	16.240.000
	1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	1000 orang	2.404.812.560	1.03.11.1.01.011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	160 Orang	314.781.000
						1.03.11.1.01.014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	204.247.000
	1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	160 orang	1.186.278.200	1.03.11.1.01.012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	753.456.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	89 orang	411.633.870	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	2,085 orang	389.565.000
			Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80%	637.912.000			Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	100%	722.838.000
	1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4 dokumen	216.189.600	1.03.11.1.02.006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	3 Layanan Informasi	83.091.000
	1.03.11.1.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	85 orang	195.444.270	1.03.11.1.02.009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	306.474.000
	1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	100 dokumen	637.912.000	1.03.11.1.02.008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	100 Dokumen	722.838.000
9	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	80	9.610.000.000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	80	6.500.000.000
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	80%	900.000.000	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100%	600.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	3 dokumen	900.000.000	1.03.12.1.01.009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200 Orang	600.000.000
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	12 kegiatan	1.500.000.000	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	20 kegiatan	1.300.000.000
	1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	10 dokumen	1.500.000.000	1.03.12.1.02.008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	10 Laporan	1.050.000.000
						1.03.12.1.02.011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	10 Berita Acara	250.000.000
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	2 kegiatan	2.310.000.000	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	2 kegiatan	2.400.000.000
						1.03.12.1.03.004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	10 Laporan	900.000.000
	1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1.600.000.000	1.03.12.1.03.007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	500.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 dokumen	710.000.000	1.03.12.1.03.006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1.000.000.000
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	37 kegiatan	4.900.000.000	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	2 kegiatan	2.200.000.000
	1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 dokumen	606.500.000					
	1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 kasus	500.000.000					
	1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	35 dokumen	3.793.500.000	1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	2.200.000.000
10	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	6%	700.000.000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	6%	661.920.000
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	7 dokumen	700.000.000	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6 dokumen	661.920.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	2 dokumen	200.000.000	1.04.02.1.01.002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	220.640.000
	1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 dokumen	300.000.000	1.04.02.1.01.006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	220.640.000
	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 dokumen	200.000.000	1.04.02.1.01.011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	2 Dokumen	220.640.000
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12,18%	47.980.000.000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	12,18%	9.000.000.000
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	36,57%	106.270.000	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	36,57%	451.279.600
	1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 laporan	106.270.000	1.04.03.1.01.017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	451.279.600
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	10 Ha	47.873.730.000	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	10 Ha	8.548.720.400

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	7 dokumen	470.000.000					
	1.04.03.1.02.04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 dokumen	40.600.000.000	1.04.03.1.02.004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Dokumen	831.160.000
	1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	10 Ha	6.803.730.000	1.04.03.1.02.013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	10 Ha	7.717.560.400
12	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	24%	725.485.902.040	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	24%	10.688.080.000
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	26 kawasan	725.485.902.040	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	26 kawasan	10.688.080.000
	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	9 dokumen	941.250.000	1.04.05.1.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	9 Dokumen	362.366.669

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	26 lokasi	720.693.572.040	1.04.05.1.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	26 Lokasi	9.990.966.731
	1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	2 laporan	3.851.080.000	1.04.05.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2 Laporan	334.746.600
13	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100%	200.000.000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100%	450.000.000
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	20 dokumen	200.000.000	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	20 dokumen	450.000.000
	2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20 dokumen	200.000.000	2.10.03.1.01.001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20 Dokumen	450.000.000
14	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100%	1.150.000.000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100%	100.000.000
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	20 kasus	1.150.000.000	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	20 kasus	100.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 dokumen	750.000.000					
	2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20 berita acara	400.000.000	2.10.04.1.01.002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Berita Acara	100.000.000
15	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	100%	1.340.000.000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	100	1.000.000.000
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	3 dokumen	1.340.000.000	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	3 dokumen	1.000.000.000
	2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	1.340.000.000	2.10.10.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan	1.000.000.000
16	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85	62.531.952.000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85	48.469.181.000
			Persentase realisasi anggaran	90%				Persentase realisasi anggaran	90%	
			Persentase indikator program yang tercapai	90,62%				Persentase indikator program yang tercapai	90,62%	
17	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85	1.735.607.000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85	3.340.114.720
			Persentase realisasi anggaran	90%				Persentase realisasi anggaran	90%	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase indikator program yang tercapai	90,62%				Persentase indikator program yang tercapai	90,62%	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4 dokumen	2.500.000.000	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4 dokumen	2.500.000.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8 dokumen					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	
	1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	24.930.000	1.03.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	24.930.000
	1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	14.092.000	1.03.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	14.092.000
	1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	14.092.000	1.03.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	14.092.000
	1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.942.000	1.03.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.942.000
	1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.942.000	1.03.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.942.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.406.062.000	1.03.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.406.062.000
	1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	22.940.000	1.03.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	22.940.000
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	51.590.560.000	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	37.299.709.000
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	111.492.000	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	123.492.000
	1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	176 orang/bulan	49.231.952.000	1.03.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	176 orang/bulan	35.878.639.000
	1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	955.468.000	1.03.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	620.148.000
	1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	111.492.000	1.04.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	123.492.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	405.140.000	1.03.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	319.794.500	
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	371.500.000	1.03.01.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	169.702.500	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	254.000.000	1.03.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	135.250.000	
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.000.000	1.03.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1.000.000	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	362.500.000	1.03.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	174.175.000	
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	5.000.000	1.03.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.000.000	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	40.000.000	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	23.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	10.000.000	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	3.000.000
	1.03.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	3.000.000	1.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	5.000.000
	1.03.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	20.000.000	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	12.000.000
	1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	7.000.000	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.000.000
	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12 dokumen	141.392.000	1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12 dokumen	78.930.000
	1.03.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	141.392.000	1.03.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	78.930.000
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3 dokumen	589.000.000	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3 dokumen	660.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 unit	450.000.000	1.03.01.1.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 unit	550.000.000	
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 laporan	9.000.000	1.03.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	5.000.000	
1.03.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	10.000.000	1.03.01.1.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	5.000.000	
1.03.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	70.000.000	1.03.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	50.000.000	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	50.000.000	1.03.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	50.000.000	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 laporan	1.470.264.000	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 laporan	1.712.042.000	
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 laporan	398.815.000	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 laporan	1.392.462.868	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
	1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000
	1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.677.000
	1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	87.500.000	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	180.000.000
	1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.000.000
	1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.582.000	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.224.000
	1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	72.764.000	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.267.800	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	54.525.725
	1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	52.500.000	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	65.000.000
	1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.000.000	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4.260.000
	1.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	89.953.200	1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	79.124.508
	1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	85.000.000	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	237.942.000
	1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	825.000.000	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000
	1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	197.012.000	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1.111.651.635

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	17.500.000	1.03.01.1.06.009	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	4.100.000
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 laporan	700.000.000	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 laporan	30.000.000
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 laporan	493.000.000	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 laporan	21.717.000
	1.03.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	630.000.000	1.03.01.1.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	
	1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	70.000.000	1.03.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	30.000.000
	1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	493.000.000	1.04.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	21.717.000
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	4.525.736.000	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	5.118.500.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	652.500.000	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	1.714.383.600
	1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.000.000	1.03.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.500.000
	1.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000,00	1.04.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	9.000.000,00
	1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	790.000.000	1.03.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	748.000.000
	1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	3.731.736.000	1.03.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	4.365.000.000
	1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	647.500.000	1.04.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.705.383.600
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	975.000.000	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	1.047.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	79.800.000	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	88.059.252	
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	490.000.000	1.03.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	606.000.000	
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan perijinannya	1 unit	33.600.000	1.04.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan perijinannya	1 unit	33.600.000	
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	175.000.000	1.03.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	150.000.000	
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	18.760.000	1.04.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	26.207.000	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	275.000.000	1.03.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	261.000.000	
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	27.440.000	1.04.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	28.252.252	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	35.000.000	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000
TOTAL JUMLAH					1.494.371.892.040					560.737.592.000

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdapat adanya perubahan dan ketidakadaan kode dan sub kegiatan dikarenakan terdapat pemutakhiran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2024 dan perubahan mekanisme penganggaran hibah yang semula berada di OPD masing-masing beralih ke BPKAD melalui Bantuan Keuangan sehingga nilai total pagu mengalami penurunan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah ke atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Selain usulan yang berasal dari kabupaten/kota. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta karya juga mendukung pokok-pokok pikiran dewan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak, mengingat masih tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur yang masih mengkonsumsi air minum yang tidak layak serta banyaknya sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara optimal, kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur keciptaan karya dapat tercapai. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum dimasing-masing Kabupaten/Kota maupun lintas wilayah(regional). Peluang pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur sebagaimana telah disusun di dalam dokumen RISPAM antara lain:

No	Nama SPAM Regional	Pelanggan/Layanan (2023)	Sumber	Kebutuhan Air (l/detik)
1	Umbulan	1,304,000	Mata air Umbulan	
2	Mojolagres	144,000	Sungai Brantas	
3	Bangkalan – Sampang Utara		Mata air klabetan	300
			Sungai Budur	
			Waduk Nipah	
4	Bangkalan – Sampang Selatan		Waduk Klampis	400

No	Nama SPAM Regional	Pelanggan/Layanan (2023)	Sumber	Kebutuhan Air (l/detik)
			Waduk Blega	
5	Pamekasan – Sumenep Utara	95,401	Sungai pasongsongan	300
6	Pamekasan - Sumenep Sel		Sungai Sumajid dan Sungai Pragaan	400
7	SPAM Pantura (Tuban – Bojonegoro-Lamongan)	443,503	Bengawan Solo	1750
8	SPAM Lintas Tengah (Nganjuk – Kediri – Jombang)	268,053	Kali Brantas	1500
9	SPAM Lintas Selatan (Trenggalek – Tulungagung)	120,000	Bendungan Wonorejo	
10	SPAM Malang Raya (Malang – Kota Malang – Kota Batu)	850,769	Sumber Pitu	1600
11	SPAM Lintas Timur (Situbondo – Bondowoso – Jember – Banyuwangi)	160,000	Sumber Candik	170
12	SPAM Madiun Nganjuk	56,680	Waduk Bening	
13	SPAM Blitar-Blitar	75,000	Mata air Rambut monte	
14	SPAM Lumajang - Jember	240,222	Sumber Mrutu	1750
15	SPAM Lumajang - Probolinggo -Kota Probolinggo	357,394	Sumber Ronggojalu	300
16	SPAM Jember - Bondowoso			
17	SPAM Malang - Malang		Sumber Pitu	1600
18	SPAM Ponorogo - Madiun		Waduk Ngebel	100
19	SPAM Sidokerto (Kalimati)		Dangsongo (Kalimati)	1500

(Sumber:RISPAM Provinsi Jawa Timur)

- Pengentasan daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.

Tabel 4. Draft Data Kekeringan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	DINAS PRKPCK JATIM			SUDAH TERTANGANI			BELUM TERTANGANI		
		Σ KEC	Σ DESA	Σ LOKASI	Σ KEC	Σ DESA	Σ LOKASI	Σ KEC	Σ DESA	Σ LOKASI
1	KEDIRI	16	110	110	10	22	22	15	88	88
2	MADIUN	10	50	50	8	34	34	6	16	16
3	MAGETAN	3	11	25	-	-	-	3	11	25
4	NGAWI	9	40	40	-	-	-	9	40	40
5	PACITAN	12	72	173	12	27	82	10	45	91
6	PONOROGO	11	30	30	4	7	7	10	23	23
7	TULUNGAGUNG	5	18	39	-	-	-	5	18	39
	BAKORWIL I	66	331	467	34	90	145	58	241	322
8	BOJONEGORO	16	47	84	9	21	32	16	26	52
9	GRESIK	11	74	169	11	46	114	10	28	55
10	JOMBANG	6	11	15	-	-	-	6	11	15
11	LAMONGAN	16	79	173	-	-	-	16	79	173
12	MOJOKERTO	4	14	18	-	-	-	4	14	18
13	NGANJUK	16	19	20	-	-	-	16	19	20
14	TUBAN	19	113	142	13	40	40	18	73	102
	BAKORWIL II	88	357	621	33	107	186	86	250	435
15	BLITAR	11	36	36	5	8	8	10	28	28
16	MALANG	10	27	54	4	4	4	8	25	50
17	PASURUAN	8	23	62	1	1	2	8	22	60
18	SIDOARJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BAKORWIL III	29	86	152	10	13	14	26	75	138
19	BANGKALAN	9	53	53	-	-	-	9	53	53
20	PAMEKASAN	11	82	341	9	26	26	2	80	315
21	SAMPANG	11	75	354	-	-	-	11	75	354
22	SUMENEP	10	30	72	1	2	4	9	28	68
	BAKORWIL IV	41	240	820	10	28	30	31	236	790
23	BANYUWANGI	3	12					3	12	-
24	BONDOWOSO							-	-	-
25	JEMBER	17	33					17	33	-
26	LUMAJANG	6	22					6	22	-
27	PROBOLINGGO	9	19	42				9	19	42
28	SITUBONDO							-	-	-
29	TRENGGALEK							-	-	-
	BAKORWIL V	35	86	42	-	-	-	35	86	42
		259	1.100	2.102	87	238	375	236	888	1.727

(Sumber: DPRKPCK Provinsi Jawa Timur)

- Peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan Sanitasi yang layak, mengingat masih banyaknya penduduk di Jawa Timur yang ber sanitasi yang tidak layak maka diperlukan kerja sama antar daerah atau kawasan dalam pemenuhan pelayanan sanitasi dan persampahan. Hal ini menjadi peluang pembangunan agar target pelayanan infrastruktur kecipa karya dapat tercapai. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sanitasi dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan dan pembangunan yang masif dan masal yang langsung menyentuh masyarakat seperti MCK Komunal, pembangunan saluran drainase rumah tangga, drainase lingkungan,

IPLT serta TPS3R dengan skala kawasan.

5. Pengentasan kawasan kumuh melalui keterpaduan program dan kegiatan. Pengentasan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan oleh satu program atau satu pihak saja. Pengentasan kawasan kumuh harus dilakukan melalui keterpaduan program dan kegiatan dengan melibatkan semua stakeholder yang terlibat di kawasan tersebut. Sehingga dalam satu kawasan kumuh ada intervensi pembangunan Air bersih, pembangunan saluran drainase, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan sanitasi, RTLH serta persampahan. Tujuh indikator kumuh yang menjadi tolak ukur yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau harus disentuh dan di tangani sehingga dengan keterpaduan pembangunan tersebut, kawasan kumuh akan berkurang, tuntas dan tidak akan kembali menjadi kawasan kumuh.
6. Perlunya peningkatan kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah dan Swasta dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jawa Timur sehingga dapat memungkinkan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Selain itu perlunya peningkatan penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti peremajaan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan peremajaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dapat menjadi potensi yang dapat dikerjasamakan dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan dunia usaha.

Tabel 5. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 yang di Akomodir

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Pacitan	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	Kawasan Pantai Watukarung, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- kegiatan adalah peningkatan jalan lingkungan (paving) - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
2	Lamongan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / Regional	5 paket	1. DESA SUMBERAGUNG KEC. MANTUP 2. DESA KEDUNGREJO KEC. SUKORAME 3. DESA PAMOTAN KEC. SAMBENG 4. DESA JATIDROJOG KEC. KEDUNGPRING 5. DESA MOJOREJO KEC. MODO, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	- Lokasi prioritas di DESA SUMBERAGUNG KEC. MANTUP - kegiatan adalah pembangunan IPAL komunal untuk 50 SR - agar dilengkapi RC nya (kesiapan lahan, kelembagaan, DED, RAB) - disesuaikan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
3	Lamongan	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	6 paket	1. DS. SUKOMALO KEC. KEDUNGPRING 2. DS. PARENGAN KEC. MADURAN 3. DS. MEDALEM KEC. MODO 4. DS. SUMBERAGUNG KEC. MODO 5. DS. KARANGWEDORO KEC. TURI 6. DS. PANGGAN KEC. MADURAN, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Lokasi prioritas di DS. SUKOMALO KEC. KEDUNGPRING - Kegiatan adalah pengeboran - agar dilengkapi RC nya (kesiapan lahan, kelembagaan, DED, RAB) - disesuaikan kemampuan anggaran
4	Jombang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Desa Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- Merupakan Kawasan kumuh kewenangan provinsi - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
5	Kediri	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Puncu, Kec. Puncu, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Termasuk SK BPBD Kediri tentang Daerah Rawan Air, agar dilampiri salinan Sknya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
6	Kediri	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa kalipang, Kec. Grogol, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Termasuk SK BPBD Kediri tentang Daerah Rawan Air, agar dilampiri salinan Sknya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
7	Kediri	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Termasuk SK BPBD Kediri tentang Daerah Rawan Air, agar dilampiri salinan Sknya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
8	Madiun	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 paket	Perum. Green Indah Sukolilo, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- kegiatan adalah jalan lingkungan dan drainase - agar disiapkan RC nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
9	Madiun	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	Perum Permata Residence, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- kegiatan adalah drainase - agar disiapkan RC nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
10	Kediri	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Besowo, Kec. Kepung, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Termasuk SK BPBD Kediri tentang Daerah Rawan Air, agar dilampiri salinan Sknya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
11	Kediri	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa kanyoran, Kec. Semen, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> - Termasuk SK BPBD Kediri tentang Daerah Rawan Air, agar dilampiri salinan Sknya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
12	Ngawi	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal / Regional	1 paket	Desa Dawung, Kec. Jogorogo, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan adalah pembangunan IPAL Komunal 50 SR - sudah ada RC: kesiapan lahan (Tanah Kas Desa) - agar dilengkapi RC: Legalitas lahan, Proposal. - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
13	Ngawi	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	Dusun Krawut RT 01-03 RW 11 Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- kegiatan adalah jalan lingkungan (Paving) - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
14	Ngawi	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	Dusun Sukowiyono V, Ds. Sukowiyono Kec. Padas, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- kegiatan adalah jalan lingkungan (Paving) - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
15	Ngawi	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 paket	Perumahan Dian Wirajaya Regensi Desa Budug Kec.Kwadungan, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan adalah jalan lingkungan dan drainase - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
16	Ngawi	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Sumberbening, Kec. Bringin, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan adalah pembangunan perpipaan, jaringan distribusi (pengembangan dari program pamsimas) - agar dilengkapi dengan SK Rawan kekeringan - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
17	Malang	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Dsn. Sumbul Ds. Klampok, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- RC agar dilengkapi - Disesuaikan kemampuan anggaran
18	Malang	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Wajak Wonoayu, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- RC agar dilengkapi (SK Rawan Air) - Disesuaikan kemampuan anggaran - Perlu cek kesiapan lahan

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
19	Pamekasan	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Bungbaruh, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan adalah sumur bor dan perpipaan - RC agar dilengkapi (SK Rawan Air) - Disesuaikan kemampuan anggaran
20	Pamekasan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Kelurahan Jungcang, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan kawasan kumuh kewenangan provinsi - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
21	Pamekasan	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Potoan dajah, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Kegiatan adalah sumur bor dan perpipaan - RC agar dilengkapi (SK Rawan Air) - Disesuaikan kemampuan anggaran
22	Probolinggo	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Dea Alas Sumur Kulon Kecamatan Kraksaan, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- merupakan kawasan kumuh kewenangan provinsi - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
23	Tulungagung	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Indomaret beji ke barat, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- kegiatan adalah pembangunan drainase (lanjutan tahun 2022) - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan kemampuan anggaran
24	Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	4 paket	1. Desa Kalirejo, Kec. Kraton 2. Desa Raci, Kec. Bangil 3. Desa Sidogiri (Sidogiri 1) Kec. Kraton 4. Desa Gajahbendo Kec. Beji	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- Usulan kegiatan di 4 lokasi, semua termasuk kawasan kumuh kewenangan provinsi - Prioritas penanganan: 1. Desa Kalirejo, Kec. Kraton (P1) 2. Desa Raci, Kec. Bangil 3. Desa Sidogiri (Sidogiri 1) Kec. Kraton 4. Desa Gajahbendo Kec. Beji - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
25	Bangkalan	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	7 paket	Lembung Gunong (Kokop) Trogon (Klampis) Klampis barat (Klampis) Klampis timur (Klampis) Sambiyon (Konang) Sen Asen (Konang) Mangga'an (Modung), Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Diakomodir di Lokasi Lembung Gunong, Kecamatan Kokop - disesuaikan kemampuan anggaran
26	Sampang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Dusun Pesisir Desa Tambaan Kecamatan Camplong sepanjang 200 m, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- Merupakan kawasan kumuh kewenangan provinsi - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
27	Sampang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Dusun Jiken Desa Taman Kecamatan Jrengik sepanjang 200 m, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- Merupakan kawasan kumuh kewenangan provinsi - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan kemampuan anggaran
28	Sampang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Dusun Keddeng Desa Torjun Kecamatan Torjun sepanjang 250 m, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- Merupakan kawasan kumuh kewenangan provinsi - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
29	Magetan	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	KARANGREJO, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- Kegiatan adalah pembangunan dan rehab drainase - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan kemampuan anggaran
30	Blitar	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Desa Penataran, Kec. Nglegok; Kelurahan Kembangarum, Kec. Sutojayan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- Usulan di Desa Penataran, Kec. Nglegok (P1); Kelurahan Kembangarum, Kec. Sutojayan; - merupakan kawasan kumuh kewenangan provinsi - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
31	Mojokerto	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Manduro manggunggajah Kec. Ngoro, DPUPR Kabupaten Mojokerto Jl R. Wijaya No. 60 Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- kegiatan adalah pengeboran - agar dilengkapi dengan SK Rawan Kekeringan dan RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
32	Mojokerto	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Dsn Bebekan RT 5 RW 12, Desa Modopuro, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, jalan Brawijaya No. 231 punggging Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	- merupakan Kawasan Kumuh kewenangan provinsi - kegiatan adalah drainase lingkungan - RC agar dilengkapi - Disesuaikan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
32	Mojokerto	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	RT 2 RW 1, RT 5 RW 1, Kelurahan Sawahan, Kec. Mojosari, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Jalan Brawijaya No. 231 Pungging Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	<ul style="list-style-type: none"> - merupakan Kawasan Kumuh kewenangan provinsi - kegiatan adalah drainase lingkungan - RC agar dilengkapi - Disesuaikan kemampuan anggaran
34	Mojokerto	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 paket	Perumahan Indraprasta Village Kecamatan Puri, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Jalan Brawijaya No. 231 Pungging Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan adalah peningkatan jalan lingkungan dan drainase (prioritas drainase) - RC agar dilengkapi - Disesuaikan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
35	Mojokerto	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	1 paket	Perumahan Bumi Sooko Permai Kecamatan Sooko, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Jalan Brawijaya No. 231 Pungging Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan adalah peningkatan jalan lingkungan dan drainase (prioritas drainase) - RC agar dilengkapi - Disesuaikan kemampuan anggaran
36	Bondowoso	Penyediaan PSU pada Perumahan Subsidi bagi MBR	2 paket	Kec. Curahdami Desa Petung (Perumahan Griya Vandola dan Perumahan Grand City), Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan adalah jalan lingkungan - usulan diakomodir - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
37	Bondowoso	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	3 paket	Kec. Pakem Desa Gadingsari Kec. Botolinggo Desa Klekean Kec. Wringin Desa Jatitamban, Provinsi Jawa Timur	2 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- diakomodir di lokasi Kec. Pakem Desa Gadingsari dan Kec. Wringin Desa Jatitamban - agar dilengkapi dengan SK Rawan kekeringan - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
38	Lumajang	Pengembangan SPAM Berbasis Masyarakat (penanganan desa rawan kekeringan pada lokasi rawan kekeringan yang ditetapkan dengan SK rawan air gubernur/bupati/walikota)	1 paket	Desa Penawungan, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	- Kegiatan adalah pengeboran dan perpipaan - agar dilengkapin dengan SK Rawan Kekeringan - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
39	Lumajang	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- kegiatan adalah jalan lingkungan dan drainase - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran
40	Lumajang	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur	1 paket	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	- kegiatan adalah jalan lingkungan dan drainase - agar dilengkapi RC-nya - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

No	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			HASIL VERIFIKASI				Keterangan
		Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
41	Lamongan	Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Dampak Relokasi Program Pembangunan Pemerintah Provinsi	1 paket	KECAMATAN LAREN KAB. LAMONGAN, Provinsi Jawa Timur	1 paket	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	- kegiatan adalah pendataan Lokasi Rawan bencana banjir - disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Tabel 6. Usulan Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 yang tidak di Akomodir

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			Alasan Tidak Diakomodir
		Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
1	Tulungagung	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Jl. Kyai Mojo, Provinsi Jawa Timur	- Usulan tidak diakomodir - masuk dalam kawasan Tamaru dengan luasan 21, 2 ha, kewenangan Pemerintah Pusat
2	Sumenep	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Desa Kertasada, Provinsi Jawa Timur	- Usulan tidak diakomodir - masuk dalam kawasan kumuh dengan luasan 26,5 ha, kewenangan Pemerintah Pusat
3	Kota Pasuruan	Penyediaan PSU Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi	1 paket	RW. 6 Kel. Blandongan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	- kegiatan adalah pelebaran jembatan - tidak akomodir karena bukan kewenangan DPRKPK
4	Kota Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Kawasan permukiman kumuh di sempadan sungai welang, Provinsi Jawa Timur Kelurahan Karangketug, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	- tidak diakomodir karena tidak termasuk baseline SK Kumuh tahun 2020

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			Alasan Tidak Diakomodir
		Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
5	Kota Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	5 paket	Permukiman kumuh di kawasan pusat kota 1 di Kota Pasuruan (Kel. Purworejo, Kel. Petamanan, Kel. Kebonsari, Kel. Karanganyar, Kel. Kandang sapi) Kec. Purworejo dan Kec. Panggunrejo, Provinsi Jawa Timur	- tidak diakomodir karena tidak termasuk baseline SK Kumuh tahun 2020
6	Kota Pasuruan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	2 Paket	Permukiman kumuh di kawasan pertanian di Kota Pasuruan (Kel. Tapaan, Kel. Kepel dan Kel. Blandongan Kecamatan Bugul Kidul), Provinsi Jawa Timur	- tidak diakomodir karena tidak termasuk baseline SK Kumuh tahun 2020
7	Lamongan	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	DS. KEBET KEC. LAMONGAN, Provinsi Jawa Timur	- Lokasi merupakan kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Pusat (35,92 ha)
8	Jombang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Desa Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	- merupakan kawasan kumuh kewenangan pusat

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			Alasan Tidak Diakomodir
		Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
9	Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Desa Tiron, Provinsi Jawa Timur	- tidak diakomodir karena tidak termasuk baseline SK Kumuh tahun 2020.
10	Jombang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	- merupakan kawasan kumuh kewenangan pusat
11	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 paket	Wilayah Kelurahan Nambangan Lor, Provinsi Jawa Timur	- Usulan Menggunakan SK Kumuh Tahun 2023 sedangkan, baseline Provinsi menggunakan tahun 2020 -DI Luar Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur -Usulan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan <10 Ha

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			Alasan Tidak Diakomodir
		Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
12	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Wilayah Kel. Nambangan Lor, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Menggunakan SK Kumuh Tahun 2023 sedangkan, baseline Provinsi menggunakan tahun 2020 -DI Luar Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur -Usulan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan <10 Ha
13	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Wilayah Kel. Nambangan Lor, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Menggunakan SK Kumuh Tahun 2023 sedangkan, baseline Provinsi menggunakan tahun 2020 -DI Luar Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur -Usulan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan <10 Ha
14	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Wilayah Kel. Banjarejo, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Menggunakan SK Kumuh Tahun 2023 sedangkan, baseline Provinsi menggunakan tahun 2020 -DI Luar Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur -Usulan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan <10 Ha

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			Alasan Tidak Diakomodir
		Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
15	Kota Madiun	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Kel. Banjarejo RT 01 - RW 01 (1 Lokasi), Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Menggunakan SK Kumuh Tahun 2023 sedangkan, baseline Provinsi menggunakan tahun 2020 -DI Luar Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur -Usulan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan luasan <10 Ha
16	Malang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Sumberpucung Karangates, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi merupakan kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Pusat
17	Kota Malang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Jl. Zaenal zakse 6 Balai RW.05 Kelurahan Jodipan, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan kawasan kumuh kewenangan kab/kota - kewenangan provinsi adalah kawasan kumuh luasan 10-15 ha
18	Sampang	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	1 Paket	Dusun Lebak Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang sepanjang 300 m, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan kawasan kumuh kewenangan kabupaten

NO	KAB/KOTA	USULAN KAB/KOTA			Alasan Tidak Diakomodir
		Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
19	Bondowoso	Penataan Kawasan Kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha)	2 Paket	Kec. Bondowoso Desa Sukowiryo (Kawasan Sentong) Desa Kembang (Kawasan Sekolahan), Provinsi Jawa Timur	- tidak diakomodir karena tidak termasuk baseline SK Kumuh tahun 2020.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Target pembangunan nasional pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP 2024 yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Timur bidang Keciaptakaryaan adalah **Prioritas Nasional 5** yang berisikan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dalam hal ini terkoneksi dengan **Prioritas Jatim 2** Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar dengan Langkah strategi diantaranya renovasi rumah tinggal layak huni, jambanisasi, penanganan desa rawan kekeringan, persampahan dan sanitasi, peningkatan sarana dan prasarana permukiman (mendukung penanganan kumuh) serta sistem penyediaan air minum.

Arah Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan pemilu 2024. Dalam mewujudkan arah kebijakan maka strategi kebijakan yang dilakukan yakni (1) peningkatan peran KTI dengan menjaga momentum pertumbuhan KBI, (2) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (3) pengurangan pengangguran. Keterkaitan dan kesesuaian Kebijakan dan sasaran Nasional tahun 2024 dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Kerja 2024 dalam percepatan pembangunan serta pengurangan dan penghapusan kemiskinan

ekstrem adalah tercapainya peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui program penyediaan sanitasi dan air minum serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dan mengurangi Kawasan kumuh dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, yaitu:

Tabel 7. Dukungan Dinas pada Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG			
MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan nilai Implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja dinas	Mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan, pengukuran dan evaluasi capaian kinerja
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum layak	Mengoptimalkan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan
		Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Menyediakan Masterplan perencanaan sanitasi regional
			Memfasilitasi sarana prasarana pengelolaan dan pengembangan persampahan, air limbah dan drainase regional
Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh permukiman	Meningkatkan penanganan Kawasan kumuh permukiman kewenangan provinsi		

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG

MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana bangunan rumah dan lingkungan yang layak huni	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana provinsi
			Meningkatkan pengembangan PSU kawasan perumahan baik swadaya maupun komersil
		Peningkatan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Meningkatkan pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara sesuai NSPK	Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan negara melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, bantuan teknis, identifikasi, penetapan dan pengelolaan sesuai standar
		optimalisasi penanganan revitalisasi kawasan	Mengoptimalkan penanganan revitalisasi kawasan dengan penyusunan rencana kebijakan, supervisi dan monitoring RTBL Kabupaten/kota sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan
		Peningkatan kualitas tenaga ahli konstruksi, kapasitas sistem SIPJAKI serta pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi	Melaksanakan pelatihan/ pembinaan tenaga ahli dan kelembagaan konstruksi
			Meningkatkan pelayanan media informasi jasa konstruksi
			Mengoptimalkan peningkatan pelatihan kapasitas administrator SIPJAKI
			Mengoptimalkan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi disertai dengan peningkatan SDM
	Terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan	Peningkatan kesesuaian rencana tata ruang	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang serta penetapan RTRW dan RTR sesuai pedoman

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG			
MISI 1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pengidentifikasian, inventarisasi data pertanahan dan mediasi sengketa tanah

Target tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	90,15%
		Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	80%
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	89,09%

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian visi dan misi Gubernur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, adalah **terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong**. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah misi pertama **mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah** yang bertujuan **meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar wilayah** yang memiliki sasaran **meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air** sehingga diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan keterhubungan antar wilayah. Kesesuaian program Nawa Bhakti Satya sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Strategis 2019-2024 adalah Bhakti 4 Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. Adanya tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu :

1. Urusan Perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui program infrstruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera social dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman serta pemenuhan kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap Rencana Tata Ruang di Jawa Timur.
3. Urusan pertanahan melalui program pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah garapan serta penatagunaan tanah.

Tabel 9. Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Bhakti 4:Jatim Akses : Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	<p>Urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :</p> <p>a) Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman</p> <p>b) Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU</p> <p>c) Belum optimalnya mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana</p> <p>d) Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap penyelenggaraan permukiman</p> <p>e) hanya tersedianya 5 rusunawa dengan kurang optimalnya dalam hal pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan dan perubahan baseline kawasan permukiman kumuh yang ditangani - Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau - Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan - Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU - minimal perumahan yang memiliki 50 rumah - Pernyaratan pelaksanaan fasilitasi PSU adalah perumahan yang memiliki minimal 50 rumah - masih banyak perumahan dari pengembang yang belum serah terima aset - Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BNPB - (tambahkan penghambat penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana) - Rehab dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dengan syarat yang menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima - rendahnya kesadaran atas hak dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Peraturan pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang no 23 Tahun 2014, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permen no 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tentang SPM - Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan - Gubernur dan wakil gubernur terkait Smart province dengan infrastruktur ICT, Tagana, Keterkaitan desa-kota yang proporsional, infrastruktur terpadu Kawasan lingkaran wilayah - Permendagri no 67 tahun 2011, Perda no 9 tahun 2019, Pergub Jawa Timur no 63 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender - Adanya baseline SK Kumuh yang harus ditangani - Dukungan SDGs Goals 11 yaitu Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan - Dukungan Pergub Jawa Timur nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan rumah susun sederhana sewa pemerintah provinsi Jawa Timur

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					kewajiban penghuni Rusunawa karena latar belakang penghuni rusunawa yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat umum, MBR, pekerja, pengungsi dan hasil Resettlement (permukiman kembali/ penggusuran) dengan berbagai karakter	
2	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Bhakti 4:Jatim Akses : Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	<p>Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi:</p> <p>a) Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak dan aman)</p> <p>b) Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional</p> <p>c) Cakupan pelayanan akses sanitasi layak dan aman yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak dan aman)</p> <p>d) belum tersedianya sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota</p> <p>e) Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang</p> <p>f) Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan, kinerja lembaga pengelolaan dalam pelayanan air minum dan sanitasi di kawasan strategis provinsi, kawasan kumuh dan rawan air - Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional - Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku - Belum optimalnya penyediaan RTR Kawasan Strategis Provinsi, Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota, dan NSPK Pemanfaatan Ruang - UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan turunannya menyebabkan munculnya kendala baru dalam proses penyusunan, mekanisme evaluasi teknis dan proses penetapan RTR - Belum terintegrasi Permen ATR dengan Permendagri dalam pengaturan penetapan produk hukum daerah terkait RTR - Perubahan pedoman penyusunan RTRW dan RDTR serta Basis data melalui terbitnya Permen ATR 11/2021 dan Permen ATR 14/2021 - Belum adanya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang untuk menyinkronkan antara rencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya data dari BNPB terkait SK daerah rawan air/ kekeringan - Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi. - Dukungan Permen no 2 tahun 2018, Prmen PUPR no 29 tahun 2018 dan Permendagri no 100 tahun 2019 tentang SPM - Perpres 80 tahun 2019 terkait kegiatan prioritas SPAM Regional - Dukungan SDGs Goals 6 yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua - Dukungan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11, 13, 15 sebagai turunan PP Nomor 21 Tahun 2021 - Tujuan capaian dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan - Pembinaan Teknis dapat dilakukan melalui Pelaksanaan sosialisasi,

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
				<p>penyesuaian dalam banyak hal</p> <p>g) Masih rendahnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</p> <p>h) Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</p> <p>i) Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan</p> <p>j) belum optimalnya dalam memberikan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi</p> <p>k) Masih minimnya informasi tentang teknologi bahan bangunan</p> <p>l) Belum Optimalnya informasi SIPJAKI</p>	<p>pembangunan dan rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan</p> <p>- Belum adanya peraturan teknis yang menjadi turunan PP 21 Tahun 2021 terkait pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>- Adanya instrument pengendalian dan kelembagaan baru dalam penyelenggaraan penataan ruang yang masih perlu beradaptasi dan penyesuaian dalam banyak hal</p> <p>- Sudah beralihnya Izin Pemanfaatan Ruang menjadi KKPR sehingga perlu penyesuaian pengendalian pemanfaatan ruang kembali.</p> <p>- Belum optimalnya penanganan khusus pada alih status rumah negara serta pembinaan jasa konstruksi</p> <p>- Menurunnya kualitas bangunan gedung dan rumah negara</p> <p>- Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas</p> <p>- Belum optimalnya penanganan revitalisasi kawasan (masih dalam dokume RTBL)</p> <p>- Banyak kawasan di kab/kota yang belum mempunyai peraturan RTBL sebagai salah satu andan rancang bangn suatu lingkungan/ kawasan untuk pemanfaatan ruang, penataan bangunan lngkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program</p>	<p>diseminasi, pelatihan, FGD, dan workshop</p> <p>- Dukungan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.</p> <p>- Dukungan UU no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Permen PUPR no 21/PRT/M/2019 tentang SMKK</p>

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<p>bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan gedung negara - Belum optimalnya penyediaan informasi di bidang teknologi bangunan - Belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi 	
3	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong	Misi 1 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah	Bhakti 4:Jatim Akses : Membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan	<p>Urusan pertanahan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Ijin lokasi di Lintas Kabupaten/Kota belum tertangani secara optimal - Hamparan tanah di lintas Kabupaten/Kota belum termanfaatkan dengan benar - Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal - Belum adanya sosialisasi mendetail terkait pembagian urusan pertanahan antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. - Belum adanya pedoman maupun panduan pelaksanaan urusan pertanahan secara menyeluruh untuk Pemerintah Daerah. - Belum adanya sinkronisasi kegiatan pertanahan dalam Rencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 14 ayat 4 bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib dan pada Pasal 18 ayat 4 terdapat arahan bahwa urusan pertanahan serumpun dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. - Adanya arahan dari RPJMN 2020-2024 bahwa urusan pertanahan terutama terkait sertifikat HAT, sertifikat redistribusi tanah dan sertifikat konsolidasi tanah menjadi salah satu program prioritas

No	Visi	Misi	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
					<p>Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua OPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi terkait urusan pertanahan. - Belum selarasnya OPD yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten/Kota, karena ada yang urusannya dilaksanakan Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maupun Sekretariat Daerah. Selain itu, juga banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membagi urusan pertanahan antara dinas teknis dengan dan Sekretariat Daerah. - Kurangnya sumber daya yang membidangi urusan pertanahan baik di Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan urusan pertanahan baik antara perangkat daerah lain maupun Kanwil/Kantah BPN. - Masih belum sepenuhnya aktif pelaksanaan reforma agrarian di Kabupaten/Kota 	<p>Presiden Jokowi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggabungan antara pertanahan dan tata ruang memungkinkan pembangunan agraria untuk pengaturan tanah dan ruang secara bersamaan dan saling terintegrasi. - Dukungan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan reforma agrarian. - Dukungan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pertanahan yaitu PP 18/2021, PP 19/2021, PP 20/2021, dan PP 43/2021.

2. Pencapaian SDG's

Sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDG's) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur antara lain tujuan 6 : memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Tujuan 11: membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan melalui program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman dan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.

3. Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sedangkan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Pengentasan Kemiskinan

Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum regional yang berfokus pada daerah rawan air/ desa rawan kekeringan berperan dalam mengurangi kantong kemiskinan dan pemenuhan air minum layak. Kebutuhan masyarakat akan sanitasi layak, pengelolaan air limbah domestik dan persampahan didukung pembangunan sarana dan prasarana melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, persampahan regional serta sistem drainase. Penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jawa Timur sehingga dapat memungkinkan penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Selain itu perlunya peningkatan penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti peremajaan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan peremajaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) maupun kerja sama perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dalam hal ini didukung oleh Program kawasan permukiman untuk penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh.

Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program pemerintah dengan menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.

3.3.2 Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Terdapat 15 Program yang mencakup 28 kegiatan dan 88 Sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 antara lain

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - o Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
 - o Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - o Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - o Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
 - o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - o Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - o Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - o Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
- b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - o Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi,
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang,
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi,
 - o Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi,
- c. Program Penatagunaan Tanah
 - o Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - o Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- e. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
 - o Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota,
- g. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
- j. Program Kawasan Permukiman
 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
- k. Program Pengembangan Perumahan
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- l. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- m. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi,
- n. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota,
- o. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi,
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada pada daerah di Jawa Timur dengan kewenangan Provinsi berupa wilayah regional (antara Kab/Kota) dan terfokus pada daerah rawan air/kawasan kekeringan serta dalam upaya penanganan pengurangan kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 10-15 Ha dan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Total Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. 535.497.477.280 Urusan

Perumahan Rakyat bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 23.690.114.720 sedangkan Urusan Pertanahan bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 1.550.000.000.

3.3.3 Penjelasan Rumusan Program

Rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik dari jenis program/kegiatan, pagu indikatif dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur.

3.3.4 Penjelasan tabel rencana program Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							560.737.592.000	
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							535.497.477.280	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Jawa Timur	85 indeks	48.469.181.000	APBD		85 indeks	
		Persentase realisasi anggaran		90 Persen				90 Persen	
		Persentase indikator program yang tercapai		90,62 persen				90,62 persen	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	8 Dokumen	2.500.000.000	APBD		8 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah		4 Dokumen				4 Dokumen	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	8 Dokumen	24.930.000	APBD		8 Dokumen	24.930.000
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	14.092.000	APBD		1 Dokumen	14.092.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	14.092.000	APBD		1 Dokumen	14.092.000
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	8.942.000	APBD		1 Dokumen	8.942.000
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	8.942.000	APBD		1 Dokumen	8.942.000
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur	5 Laporan	2.406.062.000	APBD		5 Laporan	2.406.062.000
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	4 Laporan	22.940.000	APBD		4 Laporan	22.940.000
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	Jawa Timur	12 Laporan	37.299.709.000	APBD		12 Laporan	37.299.709.000
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	176 Orang/ Bulan	35.878.639.000	APBD		176 Orang/ Bulan	35.878.639.000
X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12 Dokumen	620.148.000	APBD		12 Dokumen	620.148.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	319.794.500	APBD		12 Dokumen	319.794.500
X.XX.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	169.702.500	APBD		12 Dokumen	169.702.500
X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	2 Laporan	135.250.000	APBD		2 Laporan	135.250.000
X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jawa Timur	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	12 Laporan	174.175.000	APBD		12 Laporan	174.175.000
X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jawa Timur	12 Laporan	23.000.000	APBD		12 Laporan	23.000.000
X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	3.000.000	APBD		1 Dokumen	3.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
X.XX.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
X.XX.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	4 Laporan	12.000.000	APBD		4 Laporan	12.000.000
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.000.000
1.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jawa Timur	12 dokumen	78.930.000	APBD		12 dokumen	78.930.000
X.XX.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jawa Timur	12 Dokumen	78.930.000	APBD		12 Dokumen	78.930.000
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	3 dokumen	660.000.000	APBD		3 dokumen	660.000.000
X.XX.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	12 Unit	550.000.000	APBD		12 Unit	550.000.000
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	12 Dokumen	5.000.000	APBD		12 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jawa Timur	12 Dokumen	5.000.000	APBD		12 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Timur	12 Dokumen	50.000.000	APBD		12 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jawa Timur	1 Orang	50.000.000	APBD		1 Orang	50.000.000
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Jawa Timur	11 dokumen	1.712.042.000	APBD		11 dokumen	1.712.042.000
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	40.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000
X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	180.000.000	APBD		1 Paket	180.000.000
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	115.000.000	APBD		1 Paket	115.000.000
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	40 Laporan	237.942.000	APBD		40 Laporan	237.942.000
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	1.000.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000.000
X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Timur	3 Dokumen	4.100.000	APBD		3 Dokumen	4.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	11 Laporan	30.000.000	APBD		11 Laporan	30.000.000
X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Timur	1 Unit	30.000.000	APBD		1 Unit	30.000.000
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	12 Laporan	5.118.500.000	APBD		12 Laporan	5.118.500.000
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1 Laporan	5.500.000	APBD		1 Laporan	5.500.000
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jawa Timur	12 Laporan	748.000.000	APBD		12 Laporan	748.000.000
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	8 Laporan	4.365.000.000	APBD		8 Laporan	4.365.000.000
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Jawa Timur	12 Laporan	1.047.000.000	APBD		12 Laporan	1.047.000.000
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jawa Timur	30 Unit	606.000.000	APBD		30 Unit	606.000.000
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Timur	8 Unit	150.000.000	APBD		8 Unit	150.000.000
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	261.000.000	APBD		1 Unit	261.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	30.000.000	APBD		1 Unit	30.000.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Jawa Timur	100%	74.250.000.000	APBD		100%	74.250.000.000
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Jawa Timur	2400 RT	74.250.000.000	APBD		2400 RT	74.250.000.000
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jawa Timur	4 dokumen	2.330.000.000	APBD		4 dokumen	2.330.000.000
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Jawa Timur	42 Liter/Detik	71.720.000.000	APBD		42 Liter/Detik	71.720.000.000
1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jawa Timur	150 Orang	200.000.000	APBD		150 Orang	200.000.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Jawa Timur	21,50 Persen	3.000.000.000	APBD		21,50 Persen	3.000.000.000
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	Jawa Timur	4 Sistem	3.000.000.000	APBD		4 Sistem	3.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jawa Timur	4 Kabupaten/Kota	500.000.000	APBD		4 Kab/Kota	500.000.000
1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Jawa Timur	0,5 Ton/hari	700.000.000	APBD		0,5 Ton/hari	700.000.000
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jawa Timur	100 Orang	200.000.000	APBD		100 Orang	200.000.000
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Jawa Timur	6 Dokumen	1.600.000.000	APBD		6 Dokumen	1.600.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Jawa Timur	95 Persen	1.980.000.000	APBD		95 Persen	1.980.000.000
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	Jawa Timur	500 Jiwa	1.980.000.000	APBD		500 Jiwa	1.980.000.000
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jawa Timur	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	Jawa Timur	18 M ³ /Hari	1.280.000.000	APBD		18 M ³ /Hari	1.280.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jawa Timur	100 Orang	200.000.000	APBD		100 Orang	200.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Jawa Timur	8,33 Persen	1.200.000.000	APBD		8,33 Persen	1.200.000.000
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	Jawa Timur	1000 Meter	1.200.000.000	APBD		1000 Meter	1.200.000.000
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jawa Timur	4 Sistem Drainase Perkotaan	1.200.000.000	APBD		4 Sistem Drainase Perkotaan	1.200.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	Jawa Timur	100 Persen	388.977.711.000	APBD		100 Persen	396.847.169.280
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Jawa Timur	23 Gedung	388.977.711.000	APBD		23 Gedung	396.847.169.280
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jawa Timur	15 Dokumen	371.120.273.000	APBD		15 Dokumen	371.120.273.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Jawa Timur	8 Bangunan Gedung	15.535.727.000	APBD		8 Bangunan Gedung	15.535.727.000
1.03.08.6.01.0009	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jawa Timur	220 Orang	1.400.000.000	APBD		220 Orang	1.400.000.000
1.03.08.1.01.0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Jawa Timur	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	200.000.000	APBD		1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	200.000.000
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Jawa Timur	15 Rumah Negara	721.711.000	APBD		15 Rumah Negara	721.711.000
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jawa Timur	5 Bangunan Gedung	7.869.458.280	APBD		5 Bangunan Gedung	7.869.458.280
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jawa Timur	33,33 Persen	850.000.000	APBD		33,33 Persen	850.000.000
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Jawa Timur	1 Kawasan	850.000.000	APBD		1 Kawasan	850.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jawa Timur	1 Dokumen	775.000.000	APBD		1 Dokumen	775.000.000
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Jawa Timur	2 Dokumen	75.000.000	APBD		2 Dokumen	75.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Jawa Timur	100 Persen	1.678.289.000	APBD		100 Persen	1.678.289.000
		Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	Jawa Timur	83 Point	722.838.000	APBD		83 Point	722.838.000
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	Jawa Timur	190 Orang	1.288.724.000	APBD		190 Orang	1.288.724.000
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Jawa Timur	1 Dokumen	16.240.000	APBD		1 Dokumen	16.240.000
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Jawa Timur	160 Orang	314.781.000	APBD		160 Orang	314.781.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Jawa Timur	30 Orang	204.247.000	APBD		30 Orang	204.247.000
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jawa Timur	50 Lembaga	753.456.000	APBD		50 Lembaga	753.456.000
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Jawa Timur	100 Orang	389.565.000	APBD		100 Orang	389.565.000
		Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Jawa Timur	100 persen	722.838.000	APBD		100 persen	722.838.000
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Jawa Timur	3 Layanan Informasi	83.091.000	APBD		3 Layanan Informasi	83.091.000
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jawa Timur	100 Orang	306.474.000	APBD		100 Orang	306.474.000
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Jawa Timur	100 Dokumen	722.838.000	APBD		100 Dokumen	722.838.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Jawa Timur	80	6.500.000.000	APBD		80	6.500.000.000
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jawa Timur	100 Persen	600.000.000	APBD		100 Persen	600.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jawa Timur	200 Orang	600.000.000	APBD		200 Orang	600.000.000
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Jawa Timur	20 Kegiatan	1.300.000.000	APBD		20 Kegiatan	1.300.000.000
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Jawa Timur	10 Laporan	1.050.000.000	APBD		10 Laporan	1.050.000.000
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Jawa Timur	10 Berita Acara	250.000.000	APBD		10 Berita Acara	250.000.000
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Jawa Timur	2 Kegiatan	2.400.000.000	APBD		2 Kegiatan	2.400.000.000
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jawa Timur	10 Laporan	900.000.000	APBD		10 Laporan	900.000.000
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jawa Timur	1 Dokumen	500.000.000	APBD		1 Dokumen	500.000.000
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jawa Timur	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000.000
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Jawa Timur	2 Kegiatan	2.200.000.000	APBD		2 Kegiatan	2.200.000.000
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jawa Timur	2 Dokumen	2.200.000.000	APBD		2 Dokumen	2.200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar								
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							23.690.114.720	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Jawa Timur	6 Persen	661.920.000	APBD		6 Persen	661.920.000
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jawa Timur	6 Dokumen	661.920.000	APBD		6 Dokumen	661.920.000
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jawa Timur	2 Dokumen	220.640.000	APBD		2 Dokumen	220.640.000
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jawa Timur	2 Dokumen	220.640.000	APBD		2 Dokumen	220.640.000
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jawa Timur	2 Dokumen	220.640.000	APBD		2 Dokumen	220.640.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Jawa Timur	12,18 persen	9.000.000.000	APBD		12,18 persen	9.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jawa Timur	36,57 persen	451.279.600	APBD		36,57 persen	451.279.600
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jawa Timur	3 Laporan	451.279.600	APBD		3 Laporan	451.279.600
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jawa Timur	10 Ha	8.548.720.400	APBD		10 Ha	8.548.720.400
1.04.03.1.02.0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jawa Timur	2 Dokumen	831.160.000	APBD		2 Dokumen	831.160.000
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Jawa Timur	10 Ha	7.717.560.400	APBD		10 Ha	7.717.560.400
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jawa Timur	24 Persen	10.688.080.000	APBD		24 Persen	10.688.080.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Jawa Timur	26 Kawasan	10.688.080.000	APBD		26 Kawasan	10.688.080.000
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jawa Timur	9 Dokumen	362.366.669	APBD		9 Dokumen	362.366.669
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jawa Timur	26 Lokasi	9.990.966.731	APBD		26 Lokasi	9.990.966.731
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jawa Timur	2 Laporan	334.746.600	APBD		2 Laporan	334.746.600
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Jawa Timur	85 Point	3.340.114.720	APBD		85 Point	3.340.114.720
		Persentase realisasi anggaran		90 persen			90 persen		
		Persentase indikator program yang tercapai		90,62 persen			90,62 persen		
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)	Jawa Timur	12 Laporan	123.492.000	APBD		12 Laporan	123.492.000
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12 Dokumen	123.492.000	APBD		12 Dokumen	123.492.000
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Jawa Timur	11 Dokumen	1.392.462.868	APBD		11 Dokumen	1.392.462.868
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	77.677.000	APBD		1 Paket	77.677.000
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	65.224.000	APBD		1 Paket	65.224.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	54.525.725	APBD		1 Paket	54.525.725
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Dokumen	4.260.000	APBD		1 Dokumen	4.260.000
1.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	79.124.508	APBD		1 Paket	79.124.508
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	1.111.651.635	APBD		1 Laporan	1.111.651.635
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jawa Timur	11 Laporan	21.717.000	APBD		11 Laporan	21.717.000
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jawa Timur	1 Unit	21.717.000	APBD		1 Unit	21.717.000
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	12 Laporan	1.714.383.600	APBD		12 Laporan	1.714.383.600
1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	1 Laporan	9.000.000	APBD		1 Laporan	9.000.000
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Laporan	1.705.383.600	APBD		1 Laporan	1.705.383.600
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Jawa Timur	12 Laporan	88.059.252	APBD		12 Laporan	88.059.252

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jawa Timur	1 Unit	33.600.000	APBD		1 Unit	33.600.000
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Timur	1 Unit	26.207.000	APBD		1 Unit	26.207.000
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	28.252.252	APBD		1 Unit	28.252.252
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								1.550.000.000
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jawa Timur	100 persen	450.000.000	APBD		100 persen	450.000.000
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Jawa Timur	20 Dokumen	450.000.000	APBD		20 Dokumen	450.000.000
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jawa Timur	20 Dokumen	450.000.000	APBD		20 Dokumen	450.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jawa Timur	100 persen	100.000.000	APBD		100 persen	100.000.000
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Jawa Timur	5 kasus	100.000.000	APBD		5 kasus	100.000.000
2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	5 Berita Acara	100.000.000	APBD		5 Berita Acara	100.000.000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Jawa Timur	100 Persen	1.000.000.000	APBD		100 Persen	1.000.000.000
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Jawa Timur	3 dokumen	1.000.000.000	APBD		3 dokumen	1.000.000.000
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jawa Timur	3 Laporan	1.000.000.000	APBD		3 Laporan	1.000.000.000

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1: "**MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI, BAIK ANTAR KELOMPOK, ANTAR SEKTOR, DAN KETERHUBUNGAN WILAYAH**"

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

4.1 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2024

Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mendukung sinkronisasi Program Prioritas Provinsi yaitu Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur dengan mewujudkan kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2024 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi dan Program Icon Gubernur Tahun 2024

PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKLATUR			SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PP 2 - Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Bhakti 4 - Jatim Akses	1. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional 2. Penanganan Desa Rawan Kekeringan	1. Perpipaan SPAM regional Mojokerto-Lamongan-Gresik (Mojolagres) di Kec. Tikung Namira 2. pembangunan reservoir di Sukapura 3. SPAM Umbulan (perlindungan headpond Umbulan (DED dan Fisik Dome, kantor, pos jaga, dll) 4. SPAM Singosari (Pembangunan Intake dan perpipaan (17 km), sumber air di Gunung Biru- Cengar) 5.review rispam 6. Pembangunan SPAM di desa rawan air (40 lokasi) - hasil musrenbang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PAD	2.330.000.000
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD	71.720.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKLATUR			SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PP 2 - Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Fasilitasi kerjasama TPA Regional ((DED TPA regional Kediri dan Probolinggo)- 4 kab kota	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	PAD	500.000.000
			TPST Sukapura (0,5 ton/hari)			Pembangunan TPA/TPST/SPA	PAD	700.000.000
			Perencanaan TPST Sukapura, Pengawasan TPST Sukapura, Appraisal Tanah Jalan Akses menuju TPA Sampah Regional Kediri Raya, Rencana Induk Pengembangan Pengelolaan Sampah Regional di Jawa Timur			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	PAD	1.600.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kajian Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik di bakorwil IV)	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	PAD	500.000.000

PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKLATUR			SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Pembangunan SPALD Komunal (lokasi berdasarkan usulan musrenbang), direncanakan 2 SPALD Komunal)			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	PAD	1.280.000.000
PP 2 - Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh (lokarya pengurangan kumuh, forum pokja PKP)	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	PAD	451.279.600
	Bhakti 4 - Jatim Akses	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh (Pembangunan fisik)	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	7.717.560.400

PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKLATUR			SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rumah Tingga Layak Huni (RUTILAHU) dan Jambanisasi	Laporan Kerjasama Pelaksanaan Rutilahu (2500 rutilahu dan 1000 unit jambanisasi)- 2 dokumen			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	831.160.000

4.2 Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DP3AK, Aula Maharani Bakorwil, Dinas Perkebunan, Perencanaan Dinas Perpusip (Jagir dan Depo arsip Pandaan), Perencanaan Gedung Ombudsman, Perencanaan DPRKPKC Jatim, Perencanaan Gudang Logistik BPBD, Perencanaan Wisata Cagar, Perencanaan Bumi Perkemahan Pacet, Perencanaan Perluasan Gedung kantor Kejati Jatim, Pembangunan fisik UPT BPPMKS Sidoarjo Dinsos Prov Jatim Tahap II, Pembangunan fisik Plaza Airlangga Tahap II, Pembangunan fisik RSBL Pasuruan dinsos Prov Jatim, Pembangunan fisik Masjid IISP, Pembangunan fisik Asrama	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	APBD	371.120.273.000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UPT RSBL Kediri Dinsos Prov. Jatim, Amdal IISP, Pembebasan lahan IISP							
2	Perencanaan Kantor Setda Prov. Jatim, Pembangunan fisik Bakorwil Pamekasan, Pembangunan Fisik Guest house Murnajati, Lawang Kab. Malang, Perencanaan asrama Islamic Centre, Perencanaan Bakesbangpol, Pembangunan fisik Dinas Satpol PP, Perencanaan Gedung Perpupip Menur, Pembangunan fisik gedung Kantor Cabang Dishut Sumenep	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	APBD	15.535.727.000	
3	Inventarisasi dan Identifikasi Kondisi Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Wilayah I (Madiun)/ Wilayah II (Bojonegoro)/ Wilayah III (Malang)/ Wilayah IV (Pamekasan) / Wilayah V (Jember)	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	APBD	200.000.000	
4	Laporan Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur, Sosialisasi Bangunan Gedung 1 dan 2, usulan rekomendasi biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung negara	Jumlah dokumen Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	APBD	1.400.000.000	
5	Monev Jasa Konstruksi dan Rekonsiliasi Rumah negara golongan III	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	APBD	721.711.000	
6	RTBL Kawasan di Kab/Kota Jawa Timur (1 dokumen RTBL)- Kab. Sidoarjo/ Kab. Probolinggo	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	APBD	775.000.000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Supervisi penentuan lokasi RTBL tahun anggaran berikutnya (2 kawasan)- Kab. Probolinggo dan Kab. Blitar serta Monitoring lokasi RTBL di Kab. Jombang dan Kab. Banyuwangi	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	APBD	75.000.000	
8	Kajian Training Needs Assessment Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (1 dokumen)	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	APBD	16.240.000	
9	Pelatihan Keahlian bidang Jasa Konstruksi, Seminar/Workshop Tenaga Ahli Konstruksi (160 orang)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	APBD	314.781.000	
10	Sertifikasi Keahlian bidang Jasa Konstruksi (30 orang)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	APBD	204.247.000	
11	Sosialisasi Jasa Konstruksi, FGD Masyarakat Jasa Konstruksi (50 lembaga)	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	APBD	753.456.000	
12	Penyelenggaraan Rekonsiliasi Sistem Pembinaan Jasa Konstruksi (3 layanan informasi – Sijejak, Silasi, IBB)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	APBD	83.091.000	
13	Bimbingan Teknis SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) (100 orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	APBD	306.474.000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Sosialisasi/workshop pembinaan Pengelolaan SPAM di Kab/Kota rawan kekeringan (28 Kab/Kota - 150 orang)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan/sosialisasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	APBD	200.000.000	
15	Sosialisasi/workshop pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan di Kab/Kota (100 orang)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan/sosialisasi	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	APBD	200,000,000	
16	Sosialisasi/workshop pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik di Kab/Kota (100 orang)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan/sosialisasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	APBD	200.000.000	
17	Pembangunan Drainase Regional dan/atau Drainase di kawasan kumuh wewenang Provinsi (sesuai dengan hasil usulan musrenbang) (4 saluran drainase)	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	APBD	1.200.000.000	
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penyusunan dan penetapan RTR (200 orang)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	APBD	600.000.000	
19	Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota (sebanyak 10 laporan evaluasi)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	APBD	1.050.000.000	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Melaksanakan pembahasan substansi dalam rangka penyusunan dan penetapan RTRW Kab/Kota (10 Berita acara)	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota			Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	APBD	250.000.000	
21	Melaksanakan koordinasi pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan KKPR kewenangan provinsi (10 Laporan)	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	APBD	900.000.000	
22	Melaksanakan penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Jawa Timur (1 dokumen)	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	APBD	500.000.000	
23	Operasionalisasi website sistem informasi penataan ruang dan pemenuhan data Indikator kinerja penataan ruang (Dokumen Informasi Penataan Ruang yang diupload melalui website) – Pelatihan Penggunaan SITR untuk Kab/Kota (1 dokumen)	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	APBD	1.000.000.000	
24	A. Melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dalam hal ini: 1. Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK 2. Penyusunan Perkada terkait Arahan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Bidang Penataan Ruang 3. Proses legalisasi Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang B. Rapat Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Output: 2 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	APBD	2.200.000.000

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Melakukan verifikasi DPPT (dokumen perencanaan pengadaan tanah) Permohonan Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (20 dokumen)	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	APBD	450,000,000	
26	Melakukan mediasi sengketa pertanahan guna menyelesaikan sengketa pertanahan dalam satu daerah Provinsi Jawa Timur (5 Berita acara)	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	APBD	100,000,000	
27	1. Inventarisasi Rencana Penggunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota dan pendukung pelaksanaan reforma agraria, yakni berupa Penyusunan Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (2 dokumen) 2. Rapat Koordinasi Pertanahan Provinsi Jawa Timur (1 dokumen) (output: 3 dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	APBD	1.000.000.000	
28	Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan (100 dokumen pengujian)	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	APBD	722.838,000	
29	Pengelolaan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Gunungsari, Jemundo, Sumurwelut, SIER, Gunung Anyar (kegiatan rutin/ reguler yaitu antara lain tagihan listrik, air, keamanan, kebersihan dan pemeliharaan gedung)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	APBD	7.869.458.280	

NO	URAIAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMPER DANA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pendataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Rawan Bencana di : Kab.Malang dan Kab. Tulungagung	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	APBD	220.640.000	
31	Pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan di Kab. Bondowoso dan Jember	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	APBD	220.640.000	
32	Pendataan Pembangunan Rumah Sewa Milik Masyarakat dan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kab. Bondowoso dan Kab. Trenggalek	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	APBD	220.640.000	
33	Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Penyediaan PSU Permukiman (Swadaya dan Komersil) - (Lokasi Prioritas : Madiun, Ponorogo, Magetan, Tulungagung, Banyuwangi, Pacitan, Jombang, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Pasuruan, Sampang, Blitar, Mojokerto, Bondowoso, Lumajang, Lamongan) (9 dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	APBD	362.366.669	
34	Pelaksanaan Pembangunan Fisik Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman swadaya dan komersial - (Lokasi Prioritas : Madiun, Ponorogo, Magetan, Tulungagung, Banyuwangi, Pacitan, Jombang, Ngawi, Pamekasan, Probolinggo, Pasuruan, Sampang, Blitar, Mojokerto, Bondowoso, Lumajang, Lamongan)- 26 lokasi	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	APBD	9.990.966.731	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya dan Komersial dengan Kab/Kota di Prov. Jawa Timur – 2 laporan (koordinasi penyelenggaraan PSU dan Forum pokja PKP)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	APBD	334.746.600	

BAB 5

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.